

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) 2023

PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN
2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 alhamdulillah telah selesai. Sebagaimana amanah yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat sistematika penyusunan LKPJ.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 merupakan LKPJ Bupati tahun ke-3 (tiga) dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memuat hasil Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan telah menjadi perhatian dan telah kami tindaklanjuti melalui implementasi program kegiatan. Konsistensi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 baik dari aspek substansi maupun secara regulasi, dimana Indikator yang tertuang dalam RKPD wajib dijadikan indikator pada LKPJ Bupati.

Olehnya dalam menganalisa tingkat ketercapaian kinerja pembangunan pada level indikator kinerja mengacu p a d a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) masih jauh dari kesempurnaan . Olehnya sebagai Bupati Kabupaten Konawe Selatan kami mengharapkan saran dan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan dalam bentuk Catatan Strategis atas penyusunan dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023 demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan atas kerjasamanya yang baik. Sehingga tercipta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Kabupaten Konawe Selatan. Ucapan terimakasih pula kami tujukan kepada jajaran Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan serta seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Selatan yang telah mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Semoga dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT.



Wassalamu'alaikum Wr Wb.

BUPATI KONAWA SELATAN

H. SURUNUDDIN DANGGA, ST, MM

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 alhamdulillah telah selesai. Sebagaimana amanah yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat sistematika penyusunan LKPJ.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 merupakan LKPJ Bupati tahun ke-3 (tiga) dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memuat hasil Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan telah menjadi perhatian dan telah kami tindaklanjuti melalui implementasi program kegiatan. Konsistensi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 baik dari aspek substansi maupun secara regulasi, dimana Indikator yang tertuang dalam RKPD wajib dijadikan indikator pada LKPJ Bupati.

Olehnya dalam menganalisa tingkat ketercapaian kinerja pembangunan pada level indikator kinerja mengacu p a d a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) masih jauh dari kesempurnaan . Olehnya sebagai Bupati Kabupaten Konawe Selatan kami mengharapkan saran dan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan dalam bentuk Catatan Strategis atas penyusunan dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023 demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan atas kerjasamanya yang baik. Sehingga tercipta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Kabupaten Konawe Selatan. Ucapan terimakasih pula kami tujukan kepada jajaran Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan serta seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Selatan yang telah mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Semoga dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

BUPATI KONAWA SELATAN

H. SURUNUDDIN DANGGA, ST, MM

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Dasar Hukum	I-1
1.2. Visi Misi Kepala Daerah	I-6
1.2.1. Visi Daerah	I-6
1.2.2. Misi Daerah	I-7
1.2.3. Tujuan dan Sasaran	I-9
1.2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	I-12
1.2.5. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	I-17
1.3. Data Umum Daerah	I-18
1.3.1. Data Geografis Wilayah	I-18
1.3.2. Jumlah Penduduk	I-20
1.3.3. Pertumbuhan Penduduk	I-26
1.3.4. Jumlah PNS	I-26
1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	I-30
1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	I-32
1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	I-33
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
2.1. Dasar Perubahan Penjabaran APBD	II-1
2.2. Arah Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah	II-2
2.3. Pendapatan Daerah	II-3
2.3.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	II-3
2.3.2. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	II-5
2.4. Belanja Daerah	II-8
2.4.1. Kebijakan Belanja Daerah	II-8
2.4.2. Target Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023..	II-10
2.4.3. Pembiayaan Daerah	II-11

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah	III-2
3.2. Kebijakan Strategis	III-43
3.3. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi LKPJ	III-47

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan	IV-1
4.2. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	IV-2

BAB V PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana Kabupaten Konawe Selatan merupakan daerah otonom pemekaran dari Kabupaten Kendari (Konawe) Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan telah menghasilkan dan menetapkan pasangan H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan Rasyid, S.Sos., M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan untuk periode tahun 2021-2026 yang dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.74.1017 Tahun 2021 pada tanggal 21 April 2021.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021-2026 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 yang dalam implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), bahwa dalam menjalankan Pemerintahan Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas Perencanaan Pembangunan Daerah maka Kepala Daerah terpilih menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2023 Bupati Konawe Selatan pada dasarnya merupakan *progress report* kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2023 yang mana hal tersebut disampaikan kepada DPRD sebagai bahan penilaian dan evaluasi untuk menjalankan fungsi pengawasan yang melekat pada tugas dan fungsi DPRD. Hasil evaluasi tersebut akan dijadikan bahan perbaikan bagi penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang sehingga dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Muatan LKPJ dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 pasal 15 bahwa ruang LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan : a) Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; b) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan; c) Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahannya dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan; d) Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan e) Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. LKPJ Bupati Konawe Selatan akhir tahun anggaran 2023 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023 beserta perubahannya, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023 beserta perubahannya dan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 beserta perubahannya.

Landasan hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 120);

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1.2.1 Visi Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah periode keempat Kabupaten Konawe Selatan yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2022-2026), yaitu: **"MENUJU KONAWE SELATAN YANG SEJAHTERA, UNGGUL DAN AMANAH BERBASIS PERDESAAN"**

Untuk memberikan pengertian yang lebih spesifik terhadap pernyataan visi tersebut maka perlu dibuat definisi operasional untuk setiap kata pada pernyataan visi tersebut. Adapun definisi operasional dari pernyataan visi tersebut adalah sebagai berikut :

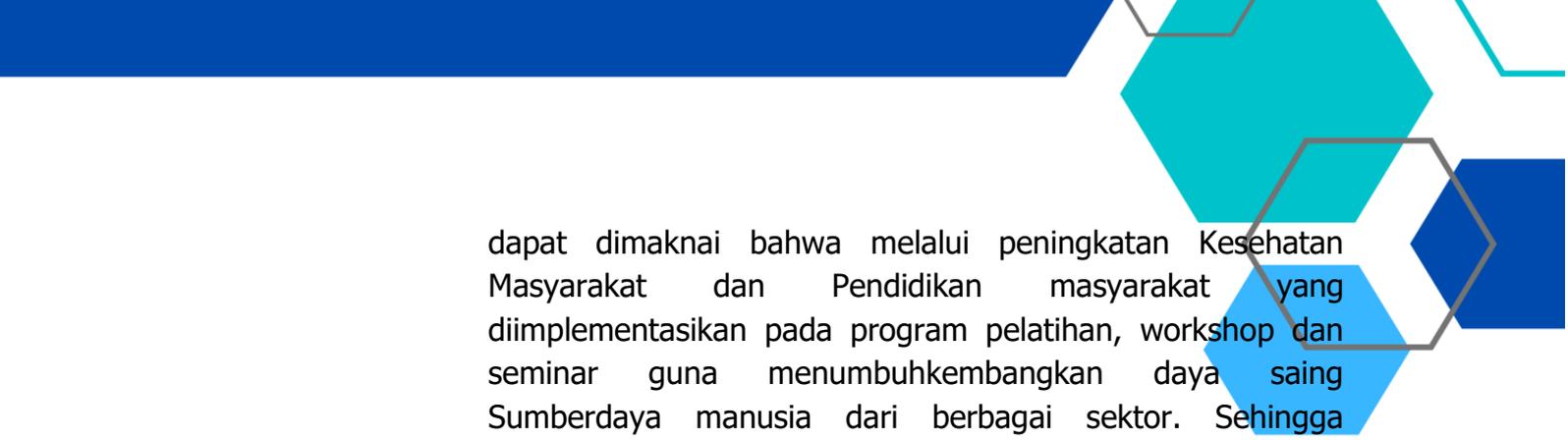
- Konawe Selatan yang **SEJAHTERA** dimaknai merujuk pada terpenuhinya sebagian besar kebutuhan dan hajat hidup yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya dengan mengoptimalkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia serta sumberdaya pengetahuan. Hal ini berkorelasi dengan potensi sumberdaya alam yang tersedia dan peningkatan kapasitas masyarakat guna meningkatkan taraf hidup ekonomi melalui pembukaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
- Konawe Selatan yang **UNGGUL** dimaknai bahwa masyarakat memiliki prestasi dan daya saing dalam segala aspek kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Bahwa perkembangan teknologi yang semakin maju mendorong fasilitasi produktivitas

- Sumberdaya serta tersedianya infrastruktur sosial ekonomi yang efisien dan efektif .
- Konawe Selatan yang AMANAH dimaknai untuk mencapai kesejahteraan dan daya saing , pemerintah menjalankan segala urusan terkait kepentingan publik secara terbuka dan bertanggung jawab (Akuntabel). Penerapan implementasi program pemerintahan mengedepankan kebutuhan masyarakat Sebagai bentuk pengabdian terhadap bangsa dan negara.
 - BERBASIS PERDESAAN dimaknai Konawe Selatan memiliki ciri daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air. Hal ini menjadikan desa agraris maupun pesisir sebagai prioritas pembangunan. Kondisi geografis sebagai salahsatu dasar pelaksanaan pembangunan terhadap pengembangan kawasan perdesaan, ketersediaan infrastruktur perdesaan, peningkatan teknologi dan sistem informasi. Akan berdampak pada tumbuh kembang ekonomi lokal yang berkelanjutan.

1.2.2 Misi Daerah

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi untuk memperjelas sekaligus memberikan arah batasan prosesdalam rangka pencapaian tujuan. Untuk mewujudkan visi Konawe Selatan 2021 – 2026, terdapat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian sasaran–sasaran tersebut dapat diukur dari capaian indikator sasaran, dimana juga telah ditetapkan target tahunannya. Oleh karenanya untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah yaitu :

- Misi 1 : Melanjutkan Pengembangan SDM
 - Misi 2 : Penguatan dan Pengembangan Perekonomian Berbasis Perdesaan yang Inklusif dan Berkelanjutan
 - Misi 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah
 - Misi 4 : Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Wilayah untuk Menopang Konektivitas
- Misi Melanjutkan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berfokus pada pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia



dapat dimaknai bahwa melalui peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pendidikan masyarakat yang diimplementasikan pada program pelatihan, workshop dan seminar guna menumbuhkembangkan daya saing Sumberdaya manusia dari berbagai sektor. Sehingga kompetensi dan keterampilan bagi guru, tenaga Kesehatan, pekerja kreatif, aparat desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan petani millennial maupun komunitas produktif dapat terus berinovasi serta berkolaborasi demi mewujudkan Pembangunan berkelanjutan. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesempatan kerja serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui Pemanfaatan Sumberdaya manusia yang berkualitas.

- Misi Penguatan dan Pengembangan Perekonomian Berbasis Perdesaan yang Inklusif dan Berkelanjutan dimaknai pembangunan yang inklusif dalam rangka meniadakan hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat miskin yang mayoritas berada di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Misi ini juga dimaknai sebagai pembangunan yang inklusif tidak terbatas kepada aspek ekonomi semata akan tetapi lebih luas memberikan akses kepada seluruh elemen masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan, termasuk di dalamnya infrastruktur dan layanan dasar. Beberapa indikator pembangunan inklusif antara lain laju pertumbuhan ekonomi, lapangan usaha produktif, dan infrastruktur ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan kesetaraan akses dan kesempatan, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, dan perlindungan . Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diyakini dapat mendorong pemerataan pendapatan dan berlanjut pada pengurangan angka kemiskinan.
- Misi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Pencapaian Misi ini akan dilakukan melalui penataan birokrasi yang kredibel, beroreantasi pada kinerja, fungsi , akuntabilitas dserta tata Kelola keuangan daerah yang transparan dan terbuka . Misi ini dapat di maknai sebagai upaya mewujudkan aparatur negara yang profesional, produktif, bertanggung jawab sehingga dapat terwujud

pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, efektif dan efisien. Upaya menjaga sinergitas antar pemangku kepentingan yaitu pihak pemerintah , swasta, dan masyarakat sehingga meningkatkan efektivitas layanan birokrasi .

- Misi Pengembangan Infrastruktur Daerah dan Wilayah Untuk menopang Konektivitas dapat dimaknai Konektivitas antar wilayah menjadi daya tahan momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga yang berdampak pada pengurangan masalah sosial ekonomi. konektivitas tertuju pada pengembangan infrastruktur dasar, pembangunan sarana dan prasarana penopang keterhubungan wilayah, sanitasi, sarana Pendidikan, Kesehatan dan perekonomian warga. Disisi lain Kkonektivitas memuat beberapa elemen yaitu aksesibilitas, transportasi dan pengembangan telekomunikasi, dimana implikasi awal pembangunan infrastruktur adalah peningkatan mobilitas manusia dan barang yang berimbas positif pada aktifitas ekonomi. Kelancaran pergerakan logistic diharapkan mampu mempersempit ketimpangan individu maupun antar wilayah di Kabupaten Konawe Selatan. Pembangunan infrastruktur mempunyai peran penting dalam penanggulangan kemiskinan, yakni dengan meningkatkan akses bagi kaum miskin dan akses bagi intervensi pemerintah untuk lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Akses yang lebih baik akan mampu mengurangi biaya ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah daerah yaitu memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.

1.2.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi Misi yang sesuai arahan Permendagri No 86 tahun 2017 dimana tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Adapun sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah. Oleh karenanya kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah. Dimana dalam akan

mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Keterkaitan Misi dan Tujuan

Misi	Tujuan
Melanjutkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas hidup manusia
Penguatan dan Pengembangan Perekonomian Berbasis Perdesaan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Wilayah untuk Menopang Konektivitas	Meningkatkan Infrastruktur dasar dan wilayah

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka matriks sasaran utama dan indikator sasaran utamanya dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : MENUJU KONAWE SELATAN SEJAHTERA, UNGGUL DAN AMANAH BERBASIS PERDESAAN TAHUN 2023		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : Melanjutkan pembangunan sumberdaya manusia	1. Meningkatkan kualitas hidup manusia	1. Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas Pendidikan manusia 3. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Meningkatnya standar hidup layak 5. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat 6. Meningkatnya kesetaraan gender 7. Terpeliharanya kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
Misi 2 : Penguatan dan pengembangan perekonomian berbasis perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi utama 2. Meningkatnya pendapatan masyarakat 3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja 4. Meningkatnya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat
Misi 3 : Penguatan tata Kelola pemerintahan dan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik 2. Meningkatkan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan public 3. Meningkatnya Kapasitas Fiskal 4. Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah
Misi 4 : Pengembangan infrastruktur dasar dan Wilayah untuk menopang Konektivitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan infrastruktur dasar dan wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah 2. Meningkatnya konektivitas Wilayah perdesaan

1.2.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Perumusan strategi dan arah kebijakan mengacu pada misi pembangunan tahun 2021-2026. Selain itu, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Dimana arah kebijakan juga memuat pokok-pokok arahan tentang penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan (2020 – 2040). Strategi yang untuk mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan untuk mencapai visi, misi, serta sasaran dan tujuan tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.3 Kebijakan dan Strategi Misi Melanjutkan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Visi : Menuju Konawe Selatan Sejahtera, Unggul dan Amanah Berbasis Perdesaan Tahun 2023			
Misi 1 : Melanjutkan pembangunan sumberdaya manusia			
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Meningkatkan kualitas hidup manusia	1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan, fasilitas Kesehatan, serta kualitas tenaga kesehatan	Meningkatkan Kesehatan ibu dan anak, kualitas gizi, dan tenaga Kesehatan, serta perilaku dan lingkungan hidup sehat
	2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan	Meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, mutu tenaga pendidik, fasilitas/koleksi perpustakaan, serta literasi

	3. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Peningkatan produksi dan keamanan pangan pokok masyarakat	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan pokok masyarakat secara proporsional berbasis triguna pangan sebagai sumber karbohidrat, protein dan vitamin
	4. Meningkatnya Standar Hidup Layak	Pemetaan saluran distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok	Meningkatkan pendapatan masyarakat yang siap dibelanjakan (disposable income)
	5. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam politik, khususnya kelompok pemilih pemula	Meningkatkan partisipasi warga dalam pemilihan umum, keterwakilan perempuan di DPRD, serta saluran suara public bagi pelayanan masyarakat
	6. Meningkatnya Kesetaraan Gender	Peningkatan Pemberdayaan perempuan dalam sector ekonomi dan perlindungan anak	Meningkatkan kesetaraan perempuan dan perlindungan anak

	7. Terpeliharanya kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas pengolahan sampah dan limbah B3	Meningkatkan kualitas serta daya tampung dan dukung lingkungan
--	--	--	--

Tabel 1.4 Kebijakan dan Strategi Misi Penguatan dan pengembangan perekonomian berbasis perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan

Misi 2 : Penguatan dan pengembangan perekonomian berbasis perdesaan dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	1. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Ekonomi Utama	Peningkatan nilai tambah sektor primer, penguatan peran sektor sekunder dan tersier	Meningkatkan pertumbuhan dan peranan sektor primer dan sekunder dalam perekonomian
	2. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Peningkatan peranan dan pertumbuhan lapangan usaha pertanian, Pertambangan, Perdagangan, Konstruksi, serta industri	Meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakat
	3. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Peningkatan pengetahuan keterampilan penduduk usia kerja	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja

	4. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan antar Kelompok Pendapatan	Pemetaan, Pengukuran serta pemutakhiran data Rumah Tangga berdasarkan Kelompok pendapatan	Meningkatkan pendapatan masyarakat pada kelompok pendapatan 40 persen terbawah
--	---	---	--

Tabel 1.5 Kebijakan dan Strategi Misi Penguatan Tata Kelola dan Keuangan Daerah

Misi 3 : Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas evaluasi kinerja, serta kesejahteraan ASN	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi Kinerja
	2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan urusan wajib pemda	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Meningkatnya Kapasitas Fiskal	Pemetaan Potensi dan Intensifikasi penerimaan Asli Daerah	Meningkatkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
	2. Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	Identifikasi, Penelusuran dan pendataan Barang Milik Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Barang Milik daerah

Tabel 1.6 Kebijakan dan Strategi Misi Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Wilayah Untuk Menopang Konektivitas

Misi 4 : Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Wilayah Menopang Konektivitas			
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
1. Meningkatkan infrastruktur dasar dan wilayah	1. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah	Peningkatan Kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur dasar dan wilayah	Meningkatkan Produktivitas Sektor Utama dan Pendukung pada tiap-tiap wilayah
	2. Meningkatnya Konektivitas Wilayah Perdesaan serta ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan pedesaan	Peningkatan keterhubungan antar wilayah serta peningkatan akses rumahtangga terhadap sanitasi	Meningkatkan keterhubungan antar wilayah perdesaan dan perluasan akses rumahtangga terhadap sistem sanitasi

1.2.5 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

Pada proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kabupaten Konawe Selatan menginternalisasikan tema pembangunan berikut sasaran prioritas pembangunan dengan sasaran pembangunan nasional, serta agenda pembangunan nasional maupun agenda pembangunan bidang sektoral provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe Selatan. Didalam konteks keselarasan antara Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kabupaten Konawe Selatan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Tema RKPD Kabupaten Konawe Selatan adalah:

"Peningkatan Infrastruktur, SDM yang Berdaya Saing dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan"

yang sejalan dengan Visi dan Misi Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dimana antara Visi dan Misi Nasional sudah memiliki interkoneksi yang jelas, sedangkan hubungan tema tahunan didalam RKPD Tahun 2023 dengan Misi Jangka Menengah Nasional dapat dijelaskan, Tema RKPD 2023 Mengandung Makna Oprasional sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur
Meningkatkan kuantitas dan menjaga kualitas infrastruktur dasar yang ada, agar tetap dapat berfungsi dengan kondisi baik dan mantap.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berdaya Saing
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subyek dari pembangunan yang harus ditingkatkan terus menerus dengan pengembangan kualitas SDM yang unggul, sehat dan berpendidikan sehingga memiliki daya saing.
3. Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan
Pemulihan Ekonomi merupakan obyek atau aktifitas pembangunan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat pasca Covid-19 dengan tetap fokus menjaga Kesehatan sehingga tercipta kekebalan komunal serta fokus pada peningkatan sektor utama yaitu pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, dan pariwisata.

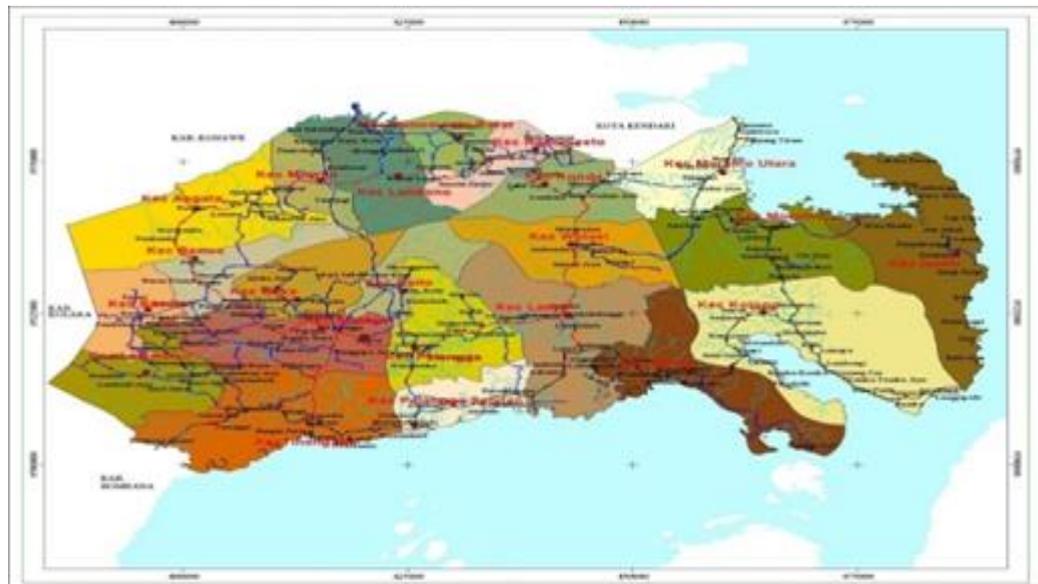
1.3 DATA UMUM DAERAH

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Secara astronomis Konawe Selatan terletak antara 30.58.56' dan 4.031.52' lintang Selatan, dan antara 121.58' dan 123.16' bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Konawe Selatan memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Utara-Konawe dan Kota Kendari;
- Timur-Laut Banda dan Laut Maluku;
- Selatan-Bombana dan Muna;
- Barat-Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur.

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kab.Konawe Selatan 2023



Sumber : Kabupaten Konawe Selatan dalam Angka, 2024

Secara administratif, Konawe Selatan terdiri atas 25 (dua puluh lima) Kecamatan, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.7 Tabel Pembagian Wilayah Administrasi Kab.Konawe Selatan Tahun 2023

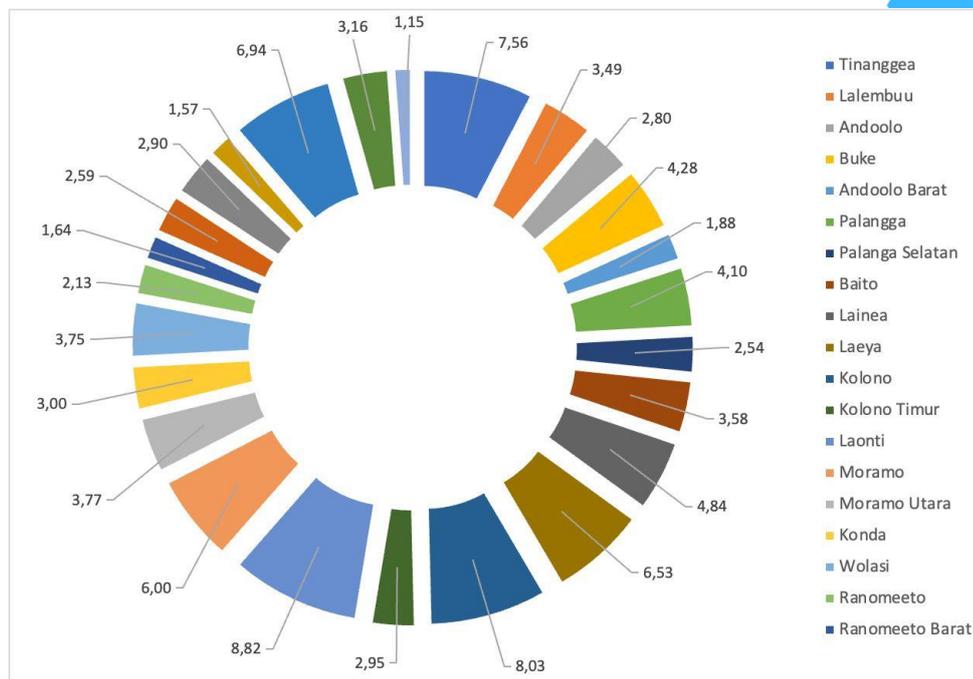
No	Kecamatan	Ibu Kota	Desa	Kel
1	Tinanggea	Tinanggea	24	2
2	Lalembuu	Atari Indah	18	1
3	Andoolo	Andoolo	10	2
4	Andoolo Barat	Anese	10	0
5	Buke	Buke	16	0

6	Palangga	Palangga	15	1
7	Palangga Selatan	Amondo	10	1
8	Baito	Baito	8	0
9	Lainea	Lainea	12	0
10	Laeya	Punggaluku	17	2
11	Kolono	Kolono	21	1
12	Kolono Timur	Tumbu-Tumbu Jaya	10	0
13	Laonti	Ulu Sawa	19	0
14	Moramo	Lapuko	20	1
15	Moramo Utara	Lalowaru	10	1
16	Konda	Konda	17	1
17	Wolasi	Aoma	7	0
18	Ranomeeto	Ranomeeto	12	1
19	Ranomeeto Barat	Lameuru	9	0
20	Landonu	Landonu	12	1
21	Sabulakoa	Sabulakoa	9	0
22	Mowila	Mowila	20	0
23	Angata	Motaha	24	0
24	Benua	Horodopi	12	0
25	Basala	Basala	9	0
Jumlah			351	15

Sumber : Kabupaten Konawe Selatan dalam Angka, 2024

Luas wilayah daratan Konawe Selatan, 451.420 Ha atau 11,83 persen dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan (laut) ± 9.368 Km² dengan panjang pantai keseluruhan termasuk pulau-pulau kecil yaitu ± 399,845 Km.

Gambar 1.2 Persentase Luas Wilayah Konawe Selatan Menurut Kecamatan, 2023



Sumber : Kabupaten Konawe Selatan dalam Angka, 2024

1.3.2 Jumlah Penduduk

Berdasarkan proyeksi penduduk Interim 2020–2023, penduduk Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023 sebanyak 322.946 jiwa yang terdiri atas 162.949 penduduk laki-laki dan 154.877 penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil SP 2020 tahun 2020, penduduk Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,67 persen. Secara umum, penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yang ditunjukkan oleh besaran sex ratio sebesar 105,10

Tabel 1.8 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, distribusi Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan, 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2023
1	Tinanggea	25.881	3,64
2	Lalembuu	16.371	1,96
3	Andoolo	11.148	5,54
4	Buke	15.160	4,14
5	Andoolo Barat	9.012	2,98
6	Palangga	15.581	5,33
7	Palangga Selatan	7.880	6,60
8	Baito	9.608	6,71
9	Lainea	10.449	4,09
10	Laeya	22.599	5,32
11	Kolono	12.066	5,87
12	Kolono Timur	5.766	7,57
13	Laonti	11.702	13,51
14	Moramo	16.171	3,43
15	Moramo Utara	9.826	10,82
16	Konda	22.641	4,22
17	Wolasi	5.987	5,85
18	Ranomeeto	20.759	-1,38
19	Ranomeeto Barat	8.559	7,18
20	Landoono	9.444	12,54
21	Mowila	14.142	3,23
22	Sabulakoa	5.408	-0,52

23	Angata	18.040	7,31
24	Benua	11.049	1,39
25	Basala	7.697	-0,32
Jumlah		322.946	4,67

Sumber : Kabupaten Konawe Selatan dalam Angka, 2024

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1	Tinanggea	8,01	81,49
2	Lalembuu	5,07	111,67
3	Andoolo	3,45	94,80
4	Buke	4,69	84,40
5	Andoolo Barat	2,79	113,99
6	Palangga	4,82	90,46
7	Palangga Selatan	2,44	73,88
8	Baito	2,98	63,90
9	Lainea	3,24	51,35
10	Laeya	7,00	82,39
11	Kolono	3,74	35,76
12	Kolono Timur	1,79	46,59
13	Laonti	3,62	31,58
14	Moramo	5,01	64,20
15	Moramo Utara	3,04	61,98
16	Konda	7,01	179,52
17	Wolasi	1,85	38,00
18	Ranomeeto	6,43	232,92
19	Ranomeeto Barat	2,65	123,92

20	Landoono	2,92	86,82
21	Mowila	4,38	116,20
22	Sabulakoa	1,67	81,80
23	Angata	5,41	61,87
24	Benua	3,42	83,34
25	Basala	2,38	158,73
Jumlah		100,0	76,88

Sumber : Kabupaten Konawe Selatan dalam Angka, 2024

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
1	Tinanggea	104,42
2	Lalembuu	105,00
3	Andoolo	102,36
4	Buke	106,96
5	Andoolo Barat	104,21
6	Palangga	103,17
7	Palangga Selatan	104,94
8	Baito	105,39
9	Lainea	103,68
10	Laeya	104,26
11	Kolono	104,68
12	Kolono Timur	101,19
13	Laonti	106,57
14	Moramo	109,63
15	Moramo Utara	105,69
16	Konda	105,23
17	Wolasi	103,64
18	Ranomeeto	103,16
19	Ranomeeto Barat	100,82
20	Landoono	101,15
21	Mowila	109,08

22	Sabulakoa	109,05
23	Angata	106,64
24	Benua	106,22
25	Basala	109,39
Jumlah		105,10

Sumber : Kabupaten Konawe Selatan dalam Angka, 2024

Tabel 1,9 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Konawe Selatan, 2023

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	15,31	15,03	30,34
2	5-9	14,70	14,37	29,08
3	10-14	14,68	14,10	28,78
4	15-19	14,88	13,90	28,77
5	20-24	14,44	13,57	28,00
6	25-29	14,17	13,39	27,56
7	30-34	13,01	12,40	25,41
8	35-39	11,73	11,58	23,30
9	40-44	11,47	11,24	22,71
10	45-49	10,61	10,15	20,76
11	50-54	9,02	8,60	17,62
12	55-59	7,16	6,63	13,79
13	60-64	5,55	4,99	10,55
14	65-69	3,90	3,60	7,51
15	70-74	2,65	2,35	5,01
16	75+	2,54	2,08	4,62
Jumlah		165,81	157,98	323,79

Sumber : Kabupaten Konawe Selatan dalam Angka, 2024

Tabel 1,10 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Konawe Selatan, 2023

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tinanggea	13.220	12.661	25.881
2	Lalembuu	8.385	7.986	16.371
3	Andoolo	5.639	5.509	11.148
4	Buke	7.835	7.325	15.160
5	Andoolo Barat	4.599	4.413	9.021
6	Palangga	7.912	7.669	15.581
7	Palangga Selatan	4.035	3.845	7.880
8	Baito	4.930	4.678	9.608
9	Lainea	5.319	5.130	10.449
10	Laeya	11.535	11.064	22.599
11	Kolono	6.171	5.895	12.066
12	Kolono Timur	2.900	2.866	5.766
13	Laonti	6.037	5.665	11.702
14	Moramo	8.457	7.714	16.171
15	Moramo Utara	5.049	4.777	9.826
16	Konda	11.609	11.032	22.641
17	Wolasi	3.047	2.940	5.987
18	Ranomeeto	10.541	10.218	20.759
19	Ranomeeto Barat	4.297	4.262	8.559
20	Landono	4.749	4.695	9.444
21	Mowila	7.378	6.764	14.142
22	Sabulakoa	2.821	2.587	5.408
23	Angata	9.310	8.730	18.040
24	Benua	5.691	5.358	11.049
25	Basala	4.021	3.676	7.697
Jumlah		165.487	157.459	322.946

Sumber : Kabupaten Konawe Selatan dalam Angka, 2024

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Pada aspek demografis, populasi Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2023 adalah sebanyak 322.946 jiwa penduduk, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 165.487 atau 51,24 persen dan penduduk perempuan sebanyak 157.459 jiwa atau 48,75 persen. Secara umum penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yang ditunjukkan oleh besaran Sex Ratio sebesar 105,10.

Tabel 1.11 Demografi Kabupaten Konawe Selatan 2023

No.	Uraian	2023
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	322.946
2	Rata-Rata Kepadatan Penduduk (Km ²)	76,88
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	4,67
4	Komposisi Penduduk, menurut :	
	a. Jenis Kelamin	322.946
	- Pria	165.487
	- Perempuan	157.459
	b. Angkatan Kerja	165.275
	- Bekerja	160.120
	- Jumlah Pengangguran	5.155

Sumber : Kabupaten Konawe Selatan dalam Angka, 2024

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023 sebesar 4,67 persen terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk sebesar 1,65 persen dari tahun 2022. Tingkat kepadatan penduduk mencapai 76,88 jiwa/km² pada tahun 2023 mengalami peningkatan 1,88 jiwa/km² di bandingkan tahun 2022 . Kecamatan Ranomeeto dengan Presentase penduduk sebesar 6,43 persen memiliki tingkat kepadatan tertinggi sebesar 232.41 Jiwa/Km² , sedangkan tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Laonti sebesar 31,58 Jiwa/Km² dengan presentase penduduk sebesar 3,62 persen.

1.3.4 Jumlah PNS

Dari sisi Aparatur Sipil Negara, Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023 tercatat sebanyak 5.096 orang.

Tabel 1.12 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Konawe Selatan, 2023

No	Jabatan	L	P	LP
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	0	0	0
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	0	0	0
3	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	30	9	39
4	Administrator	178	43	221
5	Pengawas	329	171	500
6	Eselon V	0	0	0
7	Jabatan Fungsional Dosen	0	0	0
8	Jabatan Fungsional Guru	756	1.202	1.958
9	Jabatan Fungsional Medis	82	416	500
10	Jabatan Fungsional Teknis	305	226	531
11	Jabatan Fungsional Umum Pelaksana	781	566	1.347
Jumlah		2.463	2.633	5.096

Sumber : Kabupaten Konawe Selatan dalam Angka, 2024

Tabel 1.13 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Konawe Selatan, 2023

No	Tingkat Pendidikan	L	P	LP
1	Sekolah Dasar (SD)	3	0	3
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3	0	3
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	326	188	514
4	Diploma I/ Akta I	1	12	13
5	Diploma II/ Akta II	36	48	84

6	Diploma III/ Akta III	81	341	422
7	Diploma IV/ Akta IV	28	47	75
8	S1/ Sarjana	1.702	1.875	3.577
9	S2/ Pasca Sarjana	277	119	396
10	S3/ Doktor/ Ph.D	6	3	9
Jumlah		2.463	2.633	5.096

Sumber : Kabupaten Konawe Selatan dalam Angka, 2024

Tabel 1.14 Jumlah PNS Menurut Jabatan Dan Jenis Kelamin Di Kab. Konawe Selatan 2023

No	Pangkat/ Golongan/ Ruang	L	P	LP
1	Golongan I	4	0	4
	I/A Juru Muda	1	0	1
	I/B Juru Muda Tingkat I	1	0	1
	I/C Juru	2	0	2
	I/D Juru Tingkat I	0	0	0
2	Golongan II	260	308	563
	II/A Pengatur Muda	32	12	44
	II/B Pengatur Muda Tingkat I	48	26	74
	II/C Pengatur	81	47	128
	II/D Pengatur Tingkat I	99	218	317
3	Golongan III	1.430	1.675	3.105
	III/A Penata Muda	202	277	479
	III/B Penata Muda Tingkat I	343	351	694
	III/C Penata	485	554	1.039
	III/D Penata Tingkat I	400	493	893
4	Golongan IV	769	655	1.424
	IV/A Pembina	366	335	701

IV/B Pembina Tingkat I	364	308	672
IV/C Pembina Utama Muda	39	10	49
IV/D Penata Utama Madya	0	2	2
IV/E Pembina Utama	0	0	0
Jumlah	2.463	2.633	5.096

Sumber : Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka, 2024

1.3.5 Realiasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Tabel 1.15 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Catatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
1	PENDAPATAN	5.1.1	1.598.895.247.203,00	1.551.853.291.166,84	123,97	1.551.853.291.166,84
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.a	104.398.968.083,00	129.422.522.361,73	137,79	100.133.442.300,84
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1	40.290.569.818,00	55.387.757.478,00	109,47	42.794.233.323,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2	8.165.000.000,00	8.945.378.165,00	109,56	4.215.192.480,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3	6.914.638.149,00	6.914.638.149,00	100,00	6.543.373.285,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.a.4	49.028.760.116,00	58.174.748.569,73	118,40	46.580.643.212,84
7	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.b	1.494.496.279.120,00	1.484.987.980.162,00	99,25	1.451.719.848.866,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.b.1	1.171.936.610.725,00	1.163.121.328.340,00	99,25	1.156.658.597.058,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1.1	14.402.522.544,00	17.523.887.544,00	121,67	34.015.919.674,00
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.b.1.2	160.860.384.181,00	160.860.384.181,00	100,00	232.178.730.013,00
11	Dana Alokasi Umum	5.1.1.b.1.3	685.798.174.000,00	692.465.648.000,00	100,97	660.907.007.900,00
12	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.b.1.4	310.875.530.000,00	292.271.408.615,00	94,02	229.556.939.471,00
13	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	5.1.1.b.2	273.679.043.000,00	273.679.043.000,00	100,00	253.601.238.000,00
14	Dana Penyesuaian	5.1.1.b.2.1	273.679.043.000,00	273.679.043.000,00	100,00	253.601.238.000,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	5.1.1.b.3	48.880.625.395,00	48.187.608.822,00	98,58	41.460.013.808,00

16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.3.1	48.880.625.395,00	48.187.608.822,00	98,58	41.460.013.808,00
17	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pendapatan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Bantuan Keuangan	5.1.1.b.4	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	5.1.1.b.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota		0,00	0,00	0,00	0,00
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.c	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pendapatan Hibah	5.1.1.c.1	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pendapatan Lainnya	5.1.1.c.2	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Tabel. 1. 16 Realisasi Belanja Menurut Belanja

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Catatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
26	BELANJA	5.1.2			81,62	1.226.055.980.457,07
27	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.138.466.639.044,00	1.057.100.725.337,00	92,85	862.359.373.158,07
28	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	596.393.288.949,00	551.941.004.133,00	92,55	522.034.921.139,00
29	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	473.359.045.362,00	441.167.265.337,00	93,20	302.382.959.427,07
30	Belanja Bunga	5.1.2.1.c	17.500.000.000,00	15.398.843.847,00	87,99	4.821.988.269,00
31	Belanja Hibah	5.1.2.1.d	51.214.304.733,00	48.594.597.020,00	94,88	20.666.070.283,00
32	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.e	0,00	0,00	0,00	12.453.103.800,00
33	BELANJA MODAL	5.1.2.2	489.336.323.390,00	448.882.471.378,00	91,73	356.616.395.490,00
34	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2	3.765.720.000,00	3.638.477.000,00	96,62	3.026.137.000,00
35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2	111.751.803.496,00	107.249.751.066,00	95,97	50.777.839.827,00
36	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2	199.832.548.366,00	181.736.441.086,00	90,94	67.338.714.760,00
37	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2	166.992.182.728,00	149.381.194.348,00	89,45	229.516.150.462,00
38	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2	166.992.182.728,00	149.381.194.348,00	99,44	3.624.075.201,00
39	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2	6.058.800.000,00	5.945.574.322,00	98,13	2.333.478.240,00
40	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	21.983.684.000,00	9.221.266.944,00	41,95	7.080.211.809,00
41	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	21.983.684.000,00	9.221.266.944,00	41,95	7.080.211.809,00
42	TRANSFER	5.1.3	351.468.159.200,00	351.327.144.600,00	99,96	323.485.708.500,00
43	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.1	351.468.159.000,00	351.327.144.600,00	99,96	323.485.708.500,00
44	Transfer Bantuan Keuangan ke	5.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00

	Pemerintah Daerah Lainnya					
45	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.1.2	351.468.159.000,00	351.327.144.600,00	99,96	323.485.708.500,00
46	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/(DEFISIT)		(402.359.558.231,00)	(252.121.105.735,27)	62,66	2.380.494.805,50

1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Tabel 1. 17 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Catatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
47	PEMBIAYAAN	5.1.4				
48	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	407.359.558.231,00	407.359.998.211,31	100,00	415.047.625.781,47
49	Penggunaan SILPA	5.1.4.1.1	407.359.558.231,00	407.359.998.211,31	100,00	169.217.580.827,47
50	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.4.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pinjaman Dalam Negeri	5.1.4.1.3	0,00	0,00	0,00	245.830.044.954,00
52	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	5.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
53	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	5.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
54	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.1.4.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
55	PEMBIAYAAN NETTO		405.178.399.460,00	407.359.227.991,24	99,97	407.359.227.991,24
56	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)/(SIKPA)	5.1.4.3	0,00	407.359.227.991,24	0,00	407.359.227.991,24

Sumber : BKAD Tahun 2023 sebelum pemeriksaan BPK



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Dasar Perubahan Penjabaran APBD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Maka berdasarkan definisi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut, keuangan daerah wajib dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien serta dilaksanakan dengan tetap memperhatikan fungsi- fungsi manajemen keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam implementasi Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 sampai dengan 2026 dan tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting. Daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakatnya sehingga mampu menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Proyeksi keuangan daerah yang akurat dan cermat dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan, sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah dihasilkan suatu kebijakan keuangan daerah yang akurat dan cermat serta tepat sasaran. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak terlepas dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Provinsi dalam hal ini Provinsi Sulawesi Tenggara serta Pemerintah Pusat, sehingga APBD pada pemerintah daerah harus berpedoman dan selalu merespon peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Perubahan APBD dapat dilakukan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- 3 Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - 4 Keadaan darurat; dan/atau
 - 5 Keadaan luar biasa.

2.2. Arah Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik. Kebijakan keuangan berisi informasi tentang kebijakan tentang pedoman dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun kedepan. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya fiskal membutuhkan kebijakan yang tepat dalam mengelola aset daerah untuk bisa menunjang penerimaan daerah. Pelaksanaan pembangunan selain ditunjang dengan pendanaan dari APBD, juga terdapat sumber pendanaan lain melalui APBN.

2.3 Pendapatan Daerah

2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam implementasi Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan pada APBD Perubahan Tahun 2023, dimana salah satunya diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong pemanfaatan sumberdaya alam dan peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Untuk mendukung hal tersebut dapat dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

1. Intensifikasi pajak, melaksanakan program kegiatan atau inovasi yang dapat menggali dan mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah yang sesuai dengan kewenangan daerah;
2. Optimalisasi pengelolaan kekayaan dan aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah;
3. Mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengelola pendapatan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi;
4. Peningkatan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak yang terkait dalam rangka peningkatan pajak daerah dan pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan milik daerah;
5. Mengoptimalkan pengelolaan BUMD sebagai bagian dari pemerintah

daerah dalam pelayanan public dan sebagai sumber pendapatan daerah.

Dalam merealisasikan target tersebut diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut :

1. Perbaiki manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian teknologi sehingga prosedur dapat disederhanakan;
2. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Arah kebijakan belanja daerah, masih mengacu pada kebijakan sebelum perubahan, yaitu:

1. Mempertimbangkan prioritas belanja daerah, yaitu:

Prioritas I, dialokasikan untuk belanja yang menjadi prioritas utama/strategis daerah, yaitu yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama daerah dan indikator kinerja utama perangkat daerah.

Prioritas II, dialokasikan untuk belanja yang menjadi prioritas pelaksanaan kewenangan daerah rutin berdasarkan bidang urusan/unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prioritas III, dialokasikan untuk belanja program penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan operasional kelembagaan perangkat daerah.

2. Memperhatikan keterpengaruh terhadap peningkatan kualitas masyarakat yang ditandai dengan ketercapaian indikator makro dan aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
3. Mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi serapan anggaran dalam setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Mendahulukan porsi belanja yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 20 (dua puluh) persen minimal untuk belanja pendidikan, termasuk belanja gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan.
 - 10 (sepuluh) persen minimal untuk belanja kesehatan, di luar gaji dan tunjangan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
 - 0,5 persen minimal untuk pelaksanaan unsur pengawasan daerah.

2.3.2 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Target pendapatan daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.598.895.247.203,00,- dengan realisasi sebesar 1.614.410.502.523,73,- atau sebesar 100,97 persen, yang pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.3.2.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Perubahan Target Pendapatan daerah yang bersumber Pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari semua komponen, terjadi penurunan target perolehan dari semula ditargetkan sebesar Rp. 104.398.968.083,00,- dengan realisasi Rp. 129.422.522.361,73,- atau sebesar 123,97 persen yang berasal dari semua komponen. Komponen pendapatan pajak daerah terdiri dari pajak Daerah sebesar Rp. 40.290.569.818,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 55.514.491.784,00,- atau sebesar 137,79 persen, Retribusi daerah sebesar Rp 8.165.000.000,00,- dengan realisasi Rp. 8.945.378.165,00,- atau sebesar 109,56 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 6.914.638.149,00,- dengan realisasi sebesar Rp 6.914.638.149,00,- atau sebesar 100 persen, perubahan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 49.028.760.116,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.048.014.263,73,- atau sebesar 118,40 persen.

2.3.2.2 Perubahan Dana Perimbangan

Pada Dana Perimbangan juga mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.494.496.279.120,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.484.987.980.162,00,- atau sebesar 99,36 persen yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar 1.171.936.610.725,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.163.121.328.340,00,- atau sebesar 99,25 persen, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp 273.679.043.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 273.679.043.000,00,- atau sebesar 100,00 persen dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 48.880.625.395,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.187.608.822,00,- atau sebesar 98,58 persen.

Secara keseluruhan Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang meliputi Target Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat dilihat pada table II.1 dibawah ini.

Tabel 2.1. Rincian Perubahan Target Pendapatan APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	TARGET PENDAPATAN (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp.)	NAIK/ TURUN (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli daerah	104.398.968.083	104.398.968.083	0	0 %
01.0	Pendapatan Pajak Daerah	40.290.569.818	40.290.569.818	0	0 %
01.0	Hasil Retribusi Daerah	8.165.000.000	8.165.000.000	0	0 %
01.0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	6.914.638.149	6.914.638.149	0	0 %
01.0	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	49.028.760.116	49.028.760.116	0	0 %
2	Dana Perimbangan	1.477.630.043.120	1.494.496.279.120	0	0 %
02.0	Transfer Pemerintah Pusat	1.428.749.417.725	1.171.936.610.725	0	0 %

1					
02.0 2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		273.679.043.000	0	0%
02.0 3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	48.880.625.395	48.880.625.395	0	0%
3	Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah	49.028.760.116	49.028.760.116	0	0%
03.0 1	Pendapatan Hibah	51.214.304.733	51.214.304.733	0	0%
JUMLAH PENDAPATAN		1.598.895.247.203	1.598.895.247.203	0	0%

Sumber : BKAD Tahun 2023

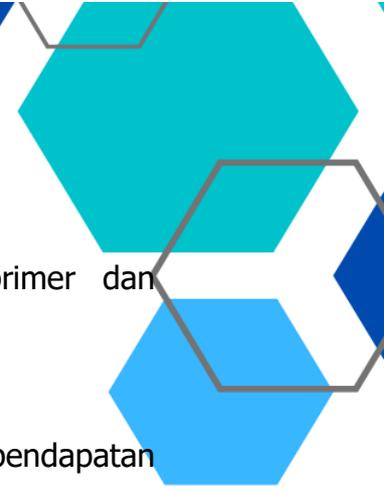
2.4 Belanja Daerah

2.4.1 Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 77 Tahun 2020 belanja pemerintah terdiri dari : 1). Belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial; 2). Belanja modal; 3). Belanja transfer (belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan); 4). Belanja tidak terduga. Kebijakan belanja pemerintah Konawe Selatan tahun 2023 diarahkan untuk mendukung terwujudnya Prioritas pembangunan daerah Tahun 2023. Prioritasi ini ditetapkan untuk mendukung upaya pencapaian pembangunan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 dan dengan memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, isu/permasalahan daerah dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Konawe Selatan tahun sebelumnya.

Sesuai dengan RPJMD 2021-2026, Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Konawe Selatan pada Tahun 2023 ditujukan untuk mendukung tercapainya Misi yang telah ditetapkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup manusia
 - a. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, kualitas gizi, dan tenaga kesehatan, serta perilaku dan lingkungan hidup sehat.
 - b. Meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, mutu tenaga pendidik, fasilitas/koleksi perpustakaan, serta literasi.
 - c. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan pokok masyarakat secara proporsional berbasis triguna pangan sebagai sumber karbohidrat, protein dan vitamin..
 - d. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang siap dibelanjakan (*disposable income*)..
 - e. Meningkatkan partisipasi warga dalam pemilihan umum, keterwakilan perempuan di DPRD, serta saluran suara publik bagi pelayanan masyarakat.
 - f. Meningkatkan kesetaraan perempuan dan perlindungan anak.
 - g. Meningkatkan kualitas biofisika serta daya tampung dan dukung lingkungan

- 
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
 - a. Meningkatkan pertumbuhan dan peranan sektor primer dan sekunder dalam perekonomian.
 - b. Meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakat.
 - c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
 - d. Meningkatkan pendapatan masyarakat pada kelompok pendapatan 40 persen terbawah
 3. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik
 - a. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi Kinerja
 - b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 - c. Meningkatkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
 - d. Meningkatkan Tata Kelola Barang Milik Daerah.
 4. Meningkatkan infrastruktur dasar dan wilayah.
 - a. Meningkatkan Produktivitas Sektor Utama dan Pendukung pada tiap-tiap wilayah.
 - b. Meningkatkan keterhubungan antar wilayah perdesaan dan perluasan akses rumahtangga terhadap sistem sanitasi.

Kebijakan umum Belanja daerah pada perubahan APBD Kabupaten Konawe Selatan pada Tahun 2023 dilaksanakan tetap berdasarkan kewenangan pemerintah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2022. Kebijakan belanja tetap diarahkan untuk mendukung pendanaan pencapaian target indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJPD 2005 – 2025, RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2023.

Kebijakan belanja yang mengakibatkan adanya Pergeseran anggaran dilakukan dengan pertimbangan capaian target kinerja program/kegiatan, sisa waktu pelaksanaan program/kegiatan, dan penyesuaian terhadap peraturan atau kebijakan yang berlaku serta diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan prioritas yang ditujukan pencapaian target Visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023. Program dan kegiatan yang sifatnya fisik yang difokuskan untuk menyelesaikan kegiatan yang belum rampung dan untuk kegiatan non fisik difokuskan untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan sosial masyarakat, serta perencanaan, desain, dan kajian lingkungan untuk pembangunan fisik pada tahun 2023.

Kebijakan umum Belanja daerah pada APBD Perubahan 2023 diarahkan

pada:

1. Memenuhi belanja mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran, seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa;
2. Memenuhi Belanja wajib yaitu belanja untuk terjaminnya pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan dan kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
3. Melaksanakan Program Prioritas dalam rangka pencapaian visi dan Misi RPJMD 2021 - 2026;
4. Mendukung pencapaian Prioritas pembangunan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 yaitu sebagai berikut : "**Peningkatan Infrastruktur, SDM yang Berdaya Saing dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan**".
5. Memperhatikan dan merujuk serta mengsinergikan kebijakan Pembangunan Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2023.
6. Mengurangi tingkat kemiskinan melalui hibah dan bantuan sosial proporsional.

2.4.2 Target Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Total Belanja Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 1.649.786.646.434,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.515.204.463.659,00,- atau sebesar 91,84 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 1.138.466.639.044,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.057.101.710.337,00,- atau sebesar 92,85, Belanja Modal sebesar Rp. 489.336.323.390,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 448.881.486.378,00,- atau sebesar 91,73 dan Belanja tak terduga sebesar Rp. 21.983.684.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.221.266.944,00,- atau sebesar 41,95

2.4.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan pengurangan alokasi anggaran pada setiap Belanja Operasi berikut ini:

1. Belanja Pegawai, belanja ini dipergunakan untuk menganggarkan

kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN, Rp. 596.393.288.949,00,- dengan realisasi sebesar Rp 551.941.004.133,00,- atau sebesar 92,55

2. Belanja Barang dan Jasa, berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain, anggaran sebesar Rp. 473.359.045.362,00,- dengan realisasi sebesar Rp 441.167.265.337,00,- atau sebesar 93,20
3. Belanja Bunga, berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi, dengan anggaran sebesar Rp. 17.500.000.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp 15.398.843.847,00,- atau sebesar 87,99
4. Belanja Hibah, merupakan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah antara lain dibelanjakan untuk hibah kepada BKPRS, KONI, MUI dan PRAMUKA, serta beberapa Organisasi dan Yayasan yang tersebar di Kabupaten Konawe Selatan dan selain itu dana hibah juga digunakan untuk Dana BOS Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 51.214.304.733,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.594.597.020,00,- atau sebesar 94,88
5. Belanja Tak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Alokasi dana Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp. 12.600.000.000,- berubah menjadi Rp. 21.983.684.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.221.266.944,00,- atau sebesar 41,95

2.4.3. Pembiayaan Daerah

Secara umum pengertian dari pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran

Sedangkan kebijakan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun



anggaran berikutnya. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada perubahan APBD 2023 secara keseluruhan diarahkan untuk menampung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, yang bersumber dari Pelampauan penerimaan PAD yang berasal dari lain-lain PAD yang sah, pelampauan penerimaan dana perimbangan yang sah dan Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Adapun kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada perubahan APBD 2023 direncanakan akan diarahkan untuk Penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD) dan diarahkan untuk pembayaran hutang pemerintah daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) / Sarana Multi Infrastruktur (SMI).



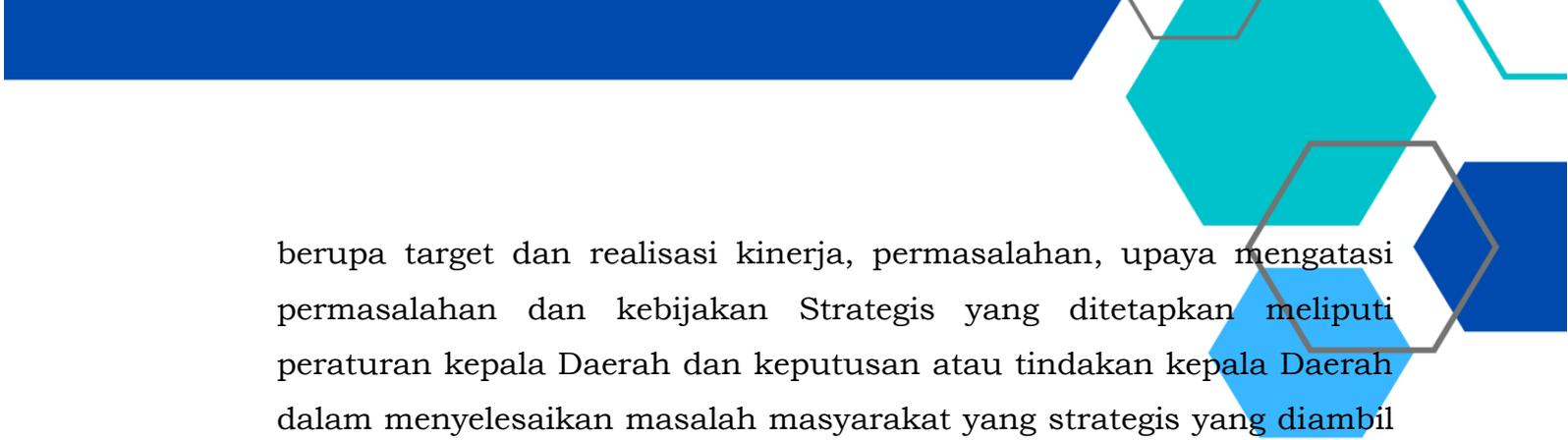
BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 merupakan program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Konawe Selatan periode 2021-2026 yang merupakan tahun ke dua periode pembangunan lima tahunan. Sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022, penyelenggaraan urusan pemerintahan diprioritaskan pada target-target RPJMD periode 2021-2026 pada tahun kedua periode tersebut.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2023 dipisahkan berdasarkan urusan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dikelompokkan kedalam Urusan Wajib yang terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar serta Urusan Pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan yaitu urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Sistematika penyusunan dalam bab ini telah digambarkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 menggunakan format yang telah ditetapkan dengan menggunakan tabel capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan,



berupa target dan realisasi kinerja, permasalahan, upaya mengatasi permasalahan dan kebijakan Strategis yang ditetapkan meliputi peraturan kepala Daerah dan keputusan atau tindakan kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran, serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun anggaran sebelumnya menguraikan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya.

Di Kabupaten Konawe Selatan memiliki 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 25 Kecamatan, Dimana dalam menjalankan program kegiatannya memiliki beberapa urusan, yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kewilayahan. Dengan rincian sebagaimana tercantum dalam berikut.

3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

REALISASI BELANJA LANGSUNG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	958.520.082.453,00	857.830.538.545,50	100.689.543.907,50	88,98
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	372.589.180.793,00	359.340.724.971,00	13.248.455.822,00	96,44
2	Dinas Kesehatan	241.750.744.371,00	196.583.329.154,50	45.167.415.216,50	81,32
3	RSUD	45.004.695.740,00	36.819.316.352,00	8.185.379.388,00	81,81
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	203.090.485.079,00	177.022.698.738,00	26.067.786.341,00	87,16
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	16.228.606.618,00	15.369.161.925,00	859.444.693,00	94,70
6	Satuan Pamong Praja	10.572.748.034,00	9.397.033.439,00	1.175.714.595,00	88,88
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.548.927.464,00	9.866.281.274,00	1.682.646.190,00	85,43
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38.777.795.005,00	36.238.646.821,00	2.539.148.184,00	93,45
9	Dinas Sosial	12.640.704.385,00	11.568.630.883,00	1.072.073.502,00	91,52
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.316.194.964,00	5.624.714.988,00	691.479.976,00	89,05
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	151.505.259.787,00	125.133.635.759,00	26.371.624.028,00	85,47
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.051.419.294,00	6.431.980.426,00	2.619.438.868,00	71,06
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.771.107.698,00	15.030.638.576,00	3.740.469.122,00	80,07
13	Dinas Ketahanan Pangan	7.851.715.703,00	6.849.947.555,00	1.001.768.148,00	87,24
14	Dinas Lingkungan Hidup	7.597.244.796,00	7.192.643.687,00	404.601.109,00	94,67
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	9.257.041.750,00	7.904.723.230,00	1.352.318.520,00	85,39
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	6.675.043.138,00	5.722.005.627,00	953.037.511,00	84,72
17	Dinas Perhubungan	9.764.510.791,00	8.888.872.480,00	875.638.311,00	91,03
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.514.986.144,00	15.141.902.238,00	2.373.083.906,00	86,45
19	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	7.227.067.344,00	6.180.028.355,00	1.047.038.989,00	85,51
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.859.527.519,00	21.802.680.461,00	10.056.847.058,00	68,43
21	Dinas Kepemudaan dan OlahRaga	9.679.484.110,00	9.274.584.619,00	404.899.491,00	95,82
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.995.128.572,00	5.380.451.189,00	614.677.383,00	89,75
23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.260.982.928,00	9.333.177.316,00	927.805.612,00	90,96
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	116.911.140.091,00	109.262.519.580,00	7.648.620.511,00	92,70
24	Dinas Perikanan	16.800.544.179,00	15.819.630.025,00	980.914.154,00	94,16
25	Dinas Pariwisata	10.364.212.610,00	9.069.325.944,00	1.294.886.666,00	87,51

26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	49.931.497.230,00	47.299.930.005,00	2.631.567.225,00	94,73
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13.716.304.628,00	13.019.707.955,00	696.596.673,00	94,92
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.098.581.444,00	24.053.925.651,00	2.044.655.793,00	92,17
4	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN	691.957.661.450,00	624.811.791.282,00	67.145.870.168,00	83,86
29	Sekretariat Daerah	89.308.692.008,00	76.586.279.758,00	12.722.412.250,00	85,75
	1. Bagian Tata Pemerintahan	3.408.125.200,00	3.365.187.896,00	42.937.304,00	98,74
	2. Bagian Kesejahteraan Rakyat	13.086.936.229,00	12.325.865.756,00	761.070.473,00	94,18
	3. Bagian Hukum	1.586.092.500,00	1.574.255.350,00	11.837.150,00	99,25
	4. Bagian Administrasi Pembangunan	1.092.319.300,00	1.081.941.603,00	10.377.697,00	99,05
	5. Bagian Perekonomian	1.349.972.600,00	1.301.570.080,00	48.402.520,00	96,41
	6. Bagian Kerjasama	844.995.900,00	844.807.900,00	188.000,00	99,98
	7. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.463.857.788,00	1.372.580.774,00	91.277.014,00	93,76
	8. Bagian Organisasi	1.795.000.000,00	1.769.071.725,00	25.928.275,00	98,56
	9. Bagian Umum	29.582.867.424,00	28.253.718.768,00	1.329.148.656,00	95,51
	10. Bagian Sumber Daya Alam	13.829.416.800,00	13.719.965.565,00	109.451.235,00	99,21
	11. Bagian Perencanaan dan Keuangan	19.873.671.842,00	17.268.816.953,00	2.604.854.889,00	86,89
	12. Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	1.395.436.425,00	1.388.339.727,00	7.096.698,00	99,49
30	Sekretariat DPRD	47.937.884.608,00	40.072.151.943,00	7.325.732.665,00	83,59
31	Inspektorat Daerah	22.915.105.182,00	17.782.731.501,00	5.132.373.681,00	77,60
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.684.190.470,00	6.831.690.261,00	2.852.500.209,00	70,54
33	Badan Keuangan & Aset Daerah	489.444.420.300,00	455.307.382.685,00	34.137.037.615,00	93,03
34	Badan Pendapatan Daerah	10.146.732.659,00	9.327.591.274,00	819.141.385,00	91,93
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.667.251.606,00	11.139.334.968,00	3.527.916.638,00	75,95
36	Badan Riset dan Inovasi Daerah	8.393.384.617,00	7.764.628.892,00	628.755.725,00	92,51
JUMLAH		1.813.674.143.781,00	1.717.038.485.166,50	201.855.658.614,50	87,75

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	PENDIDIKAN								
		DINAS PENDIDIKAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Perencanaan DAK tidak hanya berorientasi pada ketersediaan anggaran tetapi mempertimbangkan asas manfaat sehingga apabila ada pekerjaan yang dibiayai oleh DAK harus lebih intens dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat agar pendanaan tersedia bisa lebih efektif pengelolaannya dan bersifat adil namun apabila tidak ada DAK maka pendanaan perlu dipertimbangkan lewat DAU.
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen dan 2 Laporan	4 Dokumen	Efisiensi Anggaran	Melaksanakan prinsip skala prioritas anggaran	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2600 ASN, 4 Dokumen, dan 3 laporan	2600 ASN, 3 Dokumen, dan 3 laporan	Efisiensi Anggaran	Melaksanakan prinsip skala prioritas anggaran	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen dan 2 Laporan	1 Dokumen dan 1 Laporan	Efisiensi Anggaran	Melaksanakan prinsip skala prioritas anggaran	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Paket, 2 Dokumen dan 3 Kegiatan	2 Paket, 2 Dokumen dan 1 Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Melaksanakan prinsip skala prioritas anggaran	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Paket, 15 Dokumen dan 60 Laporan	9 Paket, 15 Dokumen dan 60 Laporan	Tidak ada Masalah	-	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40 Unit	40 Unit	Tidak ada Masalah	-	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan	6 Laporan	Tidak ada Masalah	-	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40 Unit Kendaraan, 20 unit Mesin peralatan, 2 unit gedung dan 2 unit sarana lainnya	40 Unit Kendaraan, 20 unit Mesin peralatan, 2 unit gedung dan 2 unit sarana lainnya	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3 RKB, 2 Ruang Guru/KS, 50 Unit sarana prasarana utilitas, 2 unit rumah dinas KS/guru, 50 Ruang kelas rehab, 12 paket mebel sekolah, 1500 Perlengkapan Peserta Didik, 6 kegiatan, 10 konten digital, dan 2 dokumen	3 RKB, 2 Ruang Guru/KS, 50 Unit sarana prasarana utilitas, 2 unit rumah dinas KS/guru, 50 Ruang kelas rehab, 12 paket mebel sekolah, 1500 Perlengkapan Peserta Didik, 6 kegiatan, 10 konten digital, dan 2 dokumen	Adanya sisa anggaran dari nilai kontrak	Sisa anggaran dari nilai kontrak dapat digunakan untuk kegiatan lain	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 RKB, 4 Unit sarana utilitas sekolah, 2 ruang kelas rehab, 8 Paket mebel sekolah, dan 9 kegiatan	1 RKB, 4 Unit sarana utilitas sekolah, 2 ruang kelas rehab, 8 Paket mebel sekolah, dan 5 kegiatan	Adanya sisa anggaran dari nilai kontrak	Sisa anggaran dari nilai kontrak dapat digunakan untuk kegiatan lain	
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6 unit Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, 10 Paket mebel PAUD, dan 5 kegiatan	6 unit Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, 10 Paket mebel PAUD, dan 5 kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 unit Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rehab, dan 5 kegiatan	1 unit Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rehab, dan 3 kegiatan	Adanya sisa anggaran dari nilai kontrak	Sisa anggaran dari nilai kontrak dapat digunakan untuk kegiatan lain	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	3 Dokumen	3 Dokumen	Efisiensi Anggaran	Melaksanakan prinsip skala prioritas anggaran	

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					Agar supaya dalam tata Kelola penyediaan barang dan jasa khususnya dana hibah atau bantuan langsung pada masyarakat agar secara paralel (secara bersamaan) mempertimbangkan pembentukan kelompok penerima manfaat dan proses pengadaan memperhatikan (by Name By Adreas), CPCL dan lain-lain.
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada Masalah		
	BIDANG KEBUDAYAAN			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Objek Pemajuan Kebudayaan, 25 Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	5 Objek Pemajuan Kebudayaan, 25 Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Tidak ada Masalah		
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Objek Pemajuan Tradisi Budaya dan 1 Laporan	10 Objek Pemajuan Tradisi Budaya dan 1 Laporan	Tidak ada Masalah		
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina dan 5 Unit Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi	100 Orang Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina dan 5 Unit Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					Dalam rangka penguatan pelaksanaan kewenangan urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan secara operasional dilaksanakan oleh OPD maka diharapkan dalam setiap jenjang rapat seluruh pimpinan bersama stafnya wajib hadir dan melakukan pertemuan rapat diskusi bersama, proses pendelegasian atau diwakilkan dapat dilakukan dengan alasan atau pertimbangan bahwa pimpinan berhalangan tetap.
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 orang Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	100 orang Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	10 Objek Cagar Budaya yang di daftarkan dan Ditetapkan	10 Objek Cagar Budaya yang di daftarkan dan Ditetapkan	Tidak ada Masalah		
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	10 Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	10 Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Tidak ada Masalah		
2.	KESEHATAN								
		DINAS KESEHATAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Paket dan 3 Kegiatan	3 Paket dan 3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Kegiatan	9 Kegiatan	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Tidak ada Masalah		<p>Dalam rangka penguatan pelaksanaan kewenangan urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan secara operasional dilaksanakan oleh OPD maka diharapkan dalam setiap jenjang rapat seluruh pimpinan bersama stafnya wajib hadir dan melakukan pertemuan rapat diskusi bersama, proses pendelegasian atau diwakilkan dapat dilakukan dengan alasan atau pertimbangan bahwa pimpinan berhalangan tetap</p>
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Peningkatan Pelayanan BLUD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN					
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Di sub kegiatan masih ada pekerjaan yang tidak terlaksana akibat lokasi kegiatan tidak sesuai perencanaan sebelumnya	mengusulkan untuk penggalan kembali diperubahan anggaran tahun 2024	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 Kegiatan	25 Kegiatan	Masih adanya pasien ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi baru lahir dan balita, yang tidak mendapatkan pelayanan Kesehatan akibat mereka tidak ke Paskes	Meningkatkan lagi sosialisasi tentang pentingnya pelayanan Kesehatan bagi pasien ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi baru lahir dan balita dalam Upaya mencegah kejadian yang bersifat fatal kepada pasien.	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1 kegiatan	1 kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32 kegiatan	27 kegiatan	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah	1 kegiatan	1 kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	36 orang Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan 12 Kegiatan	36 orang Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan 8 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	38 Sarana Apotek	38 Sarana Apotek	Tidak ada Masalah		
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70 lokasi	70 lokasi	Tidak ada Masalah		
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	62 Lokasi IRTP	62 Lokasi IRTP	Tidak ada Masalah		Perencanaan DAK tidak hanya berorientasi pada ketersediaan anggaran tetapi mempertimbangkan asas manfaat sehingga apabila ada pekerjaan yang dibiayai oleh DAK harus lebih intens dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat agar pendanaan tersedia bisa lebih efektif pengelolaannya dan bersifat adil namun apabila tidak ada DAK maka pendanaan perlu dipertimbangkan lewat DAU.
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26 Dokumen	26 Dokumen	Tidak ada Masalah		
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26 Dokumen	26 Dokumen	Tidak ada Masalah		
3	KESEHATAN								
		RUSD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7 Orang	7 Orang	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	30 Kali	9 Kali			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	7 Unit	Tidak ada Masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Unit	6 Unit	Tidak ada Masalah		
				Peningkatan Pelayanan BLUD	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10 Paket	9 Paket			
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		Dalam rangka penguatan pelaksanaan kewenangan urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan secara operasional dilaksanakan oleh OPD maka diharapkan dalam setiap jenjang rapat seluruh pimpinan bersama stafnya wajib hadir dan melakukan pertemuan rapat diskusi bersama, proses pendelegasian atau diwakilkan dapat dilakukan dengan alasan atau pertimbangan bahwa pimpinan berhalangan tetap
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
4.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
		DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN PEMAKAMAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	sisa pembayaran yang masih tersisa dan dikembalikan ke kasda	di STS kan dan dikembalikan ke Kasda	

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Bulan	14 Bulan	Tidak ada Masalah		Perencanaan DAK tidak hanya berorientasi pada ketersediaan anggaran tetapi mempertimbangkan asas manfaat sehingga apabila ada pekerjaan yang dibiayai oleh DAK harus lebih intens dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat agar pendanaan tersedia bisa lebih efektif pengelolaannya dan bersifat adil namun apabila tidak ada DAK maka pendanaan perlu dipertimbangkan lewat DAU.
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket dan 7 Kegiatan	1 Paket dan 7 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun Anggaran dan 6 Unit Pengadaan Barang	1 tahun Anggaran dan 6 Unit Pengadaan Barang	Tidak ada Masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit Kendaraan Dinas, 5 Unit Pengadaan Barang	3 Unit Kendaraan Dinas, 5 Unit Pengadaan Barang	Tidak ada Masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun dan 1 paket	1 Tahun dan 1 paket	Tidak ada Masalah		
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1 Paket dan 1 Kegiatan	1 Paket dan 1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7 Paket	7 Paket	Tidak ada Masalah		
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1 Tahun dan 1 Pengadaan barang	1 Tahun	Tidak ada Masalah		Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	19 paket dan 1 Kegiatan	19 paket dan 1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	31 paket	31 paket	Tidak ada Masalah		
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					
				Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS - 3R / TPS	2 Paket	2 Paket	Tidak ada Masalah		
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Anggaran 1 Tahun dan 1 Paket	Anggaran 1 Tahun dan 1 Paket	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	12 Paket	12 Paket	Tidak ada Masalah		
				Pembangunan / Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	2 Paket	2 Paket	Tidak ada Masalah		
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	15 Paket	15 Paket	Tidak ada Masalah		Dalam rangka penguatan pelaksanaan kewenangan urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan secara operasional dilaksanakan oleh OPD maka diharapkan dalam setiap jenjang rapat seluruh pimpinan bersama stafnya wajib hadir dan melakukan pertemuan rapat diskusi bersama, proses pendelegasian atau diwakilkan dapat dilakukan dengan alasan atau pertimbangan bahwa pimpinan berhalangan tetap
				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	23 Paket	23 Paket	Tidak ada Masalah		
				Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	3 Unit Pengadaan Barang dan Kegiatan 1 Tahun Anggaran	3 Unit Pengadaan Barang dan Kegiatan 1 Tahun Anggaran	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	8 Paket	8 Paket	Tidak ada Masalah		
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten / Kota	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	12 Paket	12 Paket	Tidak ada Masalah		
				Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	2 Paket	2 Paket	Tidak ada Masalah		
				Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					
				Penataan Bangunan dan Lingkungan	17 Paket	17 Paket	Tidak ada Masalah		
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Survey Kondisi Jalan / Jembatan	1 Paket	1 Paket	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pembangunan Jalan	86 Paket	86 Paket	Ada Sebagian paket pada sub kegiatan yang tidak terlaksana, salah satunya Paket Pekerjaan Peningkatan jalan Ruas Tambolosu - Laonti	Luncuran, dilaksanakan pada Tahun 2024	
				Pemeliharaan Rutin Jalan	7 Paket	7 Paket	Tidak ada Masalah		
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	1 Paket	1 Paket	Tidak ada Masalah		
				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan / Jembatan	1 Tahun	-	Tidak ada Masalah		
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					
				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	5 Paket dan 1 Kegiatan	5 Paket dan 1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Program Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					
				Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Program Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	1 Paket	1 Paket	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Tahun	-			
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Tahun	-			
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Tahun	-			

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
5.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51 Stel	51 Stel	Tidak ada masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	1 Unit	Tidak ada Masalah		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Paket	7 Paket	Tidak ada Masalah		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Paket	5 Paket	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	5 OH	5 OH	Tidak ada Masalah		
				Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada Masalah		
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	58 Unit	58 Unit	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
6.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 bulan	14 bulan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	4 Paket dan 1 Tahun Anggaran	4 Paket dan 1 Tahun Anggaran	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket Mebel, 3 Paket Peralatan Mesin Lainnya dan 3 Paket Pengadaan Gedung Kantor bangunan lainnya	1 Paket Mebel, 3 Paket Peralatan Mesin Lainnya dan 3 Paket Pengadaan Gedung Kantor bangunan lainnya	Tidak ada Masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Penataan Organisasi	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
7.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Bulan Gaji dan 1 Tahun anggaran	14 Bulan Gaji dan 1 Tahun anggaran	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket dan 2 kegiatan	1 Paket dan 2 kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Paket peralatan dan perlengkapan kantor, 1 Tahun anggaran	2 Paket peralatan dan perlengkapan kantor, 1 Tahun anggaran	Tidak ada Masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Paket	8 Paket	Tidak ada Masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit	2 Unit	Tidak ada Masalah		
				Penataan Organisasi	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				PROGRAM PENCEGAHAN PENGENDALIAN PEMADAMAN PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Pemdaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Kasus	52 Kasus	Tidak ada Masalah		
				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	52 Orang	87 Orang	Tidak ada Masalah		
				Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	12 Lembaga	12 Lembaga	Tidak ada Masalah		
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	250 Orang	1477 Orang	Tidak ada Masalah		
8.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYRAKAT								
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Bulan Gaji dan 1 Tahun anggaran	14 Bulan Gaji dan 1 Tahun anggaran	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Paket	2 Paket	Tidak ada Masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
9.	URUSAN SOSIAL								
		DINAS SOSIAL		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Kegiatan	8 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAFZA dimluar Panti Sosial	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
10.	URUSAN SOSIAL								
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					
	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	Tidak ada Masalah		Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21 Orang	21 Orang	Tidak ada Masalah		
	Bidang Sosial			Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	3 Paket	3 Paket	Tidak ada Masalah		
	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Paket	4 Paket	Tidak ada Masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15 Paket	15 Paket	Tidak ada Masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31 Orang	31 Orang	Tidak ada Masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	15 Unit	Tidak ada Masalah		
	Bidang Sosial			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Unit	10 Unit	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5 Paket	5 Paket	Tidak ada Masalah		
				Pelayanan Keselamatan dan Evakuasi Korban Bencana	220 Orang	220 Orang	Tidak ada Masalah		
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Paket	1 Paket	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan		
				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1 Tahun	1 Tahun	Tidak Ada Permasalahan		
				ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1 Tahun	1 Tahun	Tidak Ada Permasalahan		
				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1 Tahun	1 Tahun	Tidak Ada Permasalahan		
				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1 Tahun	1 Tahun	Tidak Ada Permasalahan		
				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1 Tahun	1 Tahun	Tidak Ada Permasalahan		
				PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1 Tahun	1 Tahun	Tidak Ada Permasalahan		
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA			<i>Refocusing</i> Anggaran mengakibatkan Program dan kegiatan tidak dilaksanakan	Memaksimalkan anggaran yang ada berdasarkan skala prioritas untuk memenuhi target kinerja	Dalam rangka penguatan pelaksanaan kewenangan urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan secara operasional dilaksanakan oleh OPD maka diharapkan dalam setiap jenjang rapat seluruh pimpinan bersama stafnya wajib hadir dan melakukan pertemuan rapat diskusi bersama, proses pendelegasian atau diwakilkan dapat dilakukan dengan alasan atau pertimbangan bahwa pimpinan berhalangan tetap
				PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan		
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan		
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan		
				PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	3 Dokumen	3 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan		
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
12.	KELUARGA BERENCANA								
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Administrasi Keuangan SKPD	70 Orang/bulan 14 Bulan	70 Orang/bulan 14 Bulan	Tidak ada masalah		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70 Paket	50 Paket	Pergeseran Anggaran Pengadaan Pakaian Dinas		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70 Unit	70 Unit	Tidak ada masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35 Paket	35 Paket	Tidak ada masalah		
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen/30 Faskes	12 Dokumen/30 Faskes	Tidak ada masalah		
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25 Balai	25 Balai	Tidak ada masalah		Perencanaan DAK tidak hanya berorientasi pada ketersediaan anggaran tetapi mempertimbangkan aspek manfaat sehingga apabila ada pekerjaan yang dibiayai oleh DAK harus lebih intens dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat agar pendanaan tersedia bisa lebih efektif pengelolannya dan bersifat adil namun apabila tidak ada DAK maka pendanaan perlu dipertimbangkan lewat DAU.
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	351 Laporan	351 Laporan	Tidak ada masalah		
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan/Triwulan	4 Laporan/Triwulan	Tidak ada masalah		
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	53 Kampung KB	0 Kampung KB	Operasional DASHAT tidak terlaksana (DAK Non Fisik)	Penganggaran Dana SILPA untuk pelaksanaan kegiatan tertunda dimaskud	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1083 Orang20 Paket10 Bulan	1083 Orang20 Paket10 Bulan	Sisa dana adalah kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh petugas TPK (tim pendamping keluarga) kecamatan	Perbaikan Penatalaksanaan Program TPK (tim pendamping keluarga) di Kecamatan	
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Paket	1 Paket	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
13.	PANGAN								
		DINAS KETAHANAN PANGAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Bulan	14 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket dan 1 Tahun anggaran	1 Paket dan 1 Tahun anggaran	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Kegiatan	7 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit Kendaraan Operasional atau lapangan dan 1 Paket peralatan mesin lainnya	3 Unit Kendaraan Operasional atau lapangan dan 1 Paket peralatan mesin lainnya	Tidak ada Masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Tidak ada Masalah		Agar supaya dalam tata Kelola penyediaan barang dan jasa khususnya dana hibah atau bantuan langsung pada masyarakat agar secara paralel (secara bersamaan) mempertimbangkan pembentukan kelompok penerima manfaat dan proses pengadaan memperhatikan (by Name By Adreas), CPCL dan lain-lain.
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	22,5 Ton	22,5 Ton	Tidak ada Masalah		
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2 Kegiatan dan 10 KWT	2 Kegiatan dan 10 KWT	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan Kecamatan	1 Peta	1 Peta	Tidak ada Masalah		
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
14.	LINGKUNGAN HIDUP								
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Bulan	26 Bulan	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	49 Buah, 2 Paket, 3 Tahun	49 Buah, 2 Paket, 3 Tahun	Tidak ada Masalah		Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket	1 Paket	Tidak ada Masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133 Buah, 12 Bulan	133 Buah, 12 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Kendaraan Dinas	15 Kendaraan Dinas	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	2 Dokumen RPPLH	2 Dokumen RPPLH	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1 Dokumen IKLH	1 Dokumen IKLH	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2 Paket	2 Paket	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 Kecamatan	7 Kecamatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Pengelolaan Sampah	1 Paket, 1 Unit Truck Sampah	1 Paket, 1 Unit Truck Sampah	Tidak ada Masalah		
15.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Bulan	26 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket, 1 Keg, 1 Tahun	1 Paket, 1 Keg, 1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Tahun, 2 Paket	6 Tahun, 2 Paket	Tidak ada Masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket	1 Paket	Tidak ada Masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Tahun	3 Tahun	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Tahun	4 Tahun	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3 Keg	3 Keg	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Keg	1 Keg	Tidak ada Masalah		
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Keg	1 Keg	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan	25 Kec, 10 Pks	25 Kec, 10 Pks	Tidak ada Masalah		
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Keg	1 Keg	Tidak ada Masalah		
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Keg	2 Keg	Tidak ada Masalah		
16.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Bulan	26 Bulan	Tidak ada Masalah		Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket, 1 Dok, 8 Org	1 Paket, 1 Dok, 8 Org	Tidak ada Masalah		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket, 5 Tahun	5 Paket, 5 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Paket	2 Paket	Tidak ada Masalah		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Tahun	3 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Unit, 2 Paket	24 Unit, 2 Paket	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
				Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	25 Kec, 2 Kawasan	25 Kec, 2 Kawasan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	9 Kegiatan, 96 Desa	9 Kegiatan, 96 Desa	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
17.	PERHUBUNGAN								
		DINAS PERHUBUNGAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Tidak ada Masalah		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Bulan	26 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada Masalah		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket, 12 Bulan, 11 Orang	1 Paket, 12 Bulan, 11 Orang	Tidak ada Masalah		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Paket, 5 Tahun	4 Paket, 5 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Paket	2 Paket	Tidak ada Masalah		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Bulan	36 Bulan	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Unit, 1 Paket	24 Unit, 1 Paket	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LITAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6 Paket	5 Paket	Tidak ada Masalah		
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	3 Paket	3 Paket	Tidak ada Masalah		
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	14 Org, 4007 Unit, 2 Laporan	14 Org, 4007 Unit, 2 Laporan	Tidak ada Masalah		
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	Tidak ada Masalah		
				Audit dan Insfeksi, Keselamatan LLAJ di Jalan	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada Masalah		
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Perbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Tahun	Tidak ada Masalah		
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Paket	1 Paket	Tidak ada Masalah		
18.	KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN								
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50 Bulan	50 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24 Stell, 35 Org	24 Stell, 32 Org	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	84 Bulan, 1 Paket		Tidak ada Masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Paket	3 Paket	Tidak ada Masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Bulan	36 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Unit, 2 Tahun	8 Unit, 2 Tahun	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4 Keg, 25 Kec, 3 Media, 4 Org	4 Keg, 25 Kec, 3 Media, 2 Org	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	4 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Pengelolaan E - Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	12 Bulan, 8 Keg	12 Bulan, 6 Keg	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten / Kota	3 Keg, 2 Org	1 Keg, 2 Org	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	9 Org, 1 Keg	9 Org, 1 Keg	Tidak ada Masalah		
19.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Tahun	3 Tahun	Tidak ada Masalah		Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Bulan	26 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Paket, 1 Keg, 1 Tahun	4 Paket, 1 Keg, 1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun, 2 Paket	1 Tahun, 2 Paket	Tidak ada Masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Paket	2 Paket	Tidak ada Masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Tahun	3 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Tahun	2 Tahun	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENUNGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	7 Keg, 2 Paket	7 Keg, 2 Paket	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	6 Paket & 1 Kegiatan	6 Paket & 1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
20.	PENANAMAN MODAL								
		DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	Tidak ada Masalah		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Bulan	26 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Tahun	3 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Tahun	7 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun, 1 Paket	1 Tahun, 1 Paket	Tidak ada Masalah		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Tahun	3 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18 Unit, 2 Tahun	18 Unit, 2 Tahun	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan, 1 Tahun	2 Kegiatan, 1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen, 1 Kegiatan	1 Dokumen, 1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan, 1 Tahun	1 Kegiatan, 1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4 Tahun	4 Tahun	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21 Keg, 220 Pelaku Usaha	21 Keg, 220 Pelaku Usaha	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
21.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4 Kegiatan	4 Kegiatan			Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Belanja Hibah KNPI dan Belanja Hibah PPBI	1 Organisasi	1 Organisasi	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	13 Kegiatan	13 Kegiatan			
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9 Paket	9 Paket	Tidak ada Masalah		
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Belanja Hibah Koni	1 Organisasi	1 Organisasi	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1 Organisasi	1 Organisasi			
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	25 Kegiatan	25 Kegiatan			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
22.	PERPUSTAKAAN								
		DINAS PERPUSTAKAAN	PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Pengembangan Bahan Pustaka	1200 Eksampler	1200 Eksampler	Tidak ada Masalah		
				Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	20 Lokus	20 Lokus	Tidak ada Masalah		
				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	Tidak ada Masalah		
			KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP KEG. PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA MELALUI JIKN (PELATIHAN PENERAPAN APLIKASI SRIKANDI)					
				Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN (Pelatihan penerapan aplikasi SRIKANDI)	60 Orang	60 Orang	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP KEG. PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN					

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	1 Dokumen JRA	1 Dokumen JRA	Tidak ada Masalah		
23.	TENAGA KERJA								
		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen dan 1 Laporan	1 Dokumen dan 1 Laporan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada Masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Tidak ada Masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Tidak ada Masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam Satu Daerah Kabupaten Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten Kota	40 Orang	40 Orang	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 Perusahaan dan 5 Laporan	5 Perusahaan dan 5 Laporan	Tidak ada Masalah		
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	15 Perkara Pencegahan Perselisihan Di Perusahaan dan 10 perkara Kasus Perselisihan hubungan industrial	15 Perkara Pencegahan Perselisihan Di Perusahaan dan 10 perkara Kasus Perselisihan hubungan industrial	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	TRANSMIGRASI			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	2 Kawasan	2 Kawasan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	2 Kawasan	2 Kawasan	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
24.	PERIKANAN								
		DINAS PERIKANAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada Masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	Tidak ada Masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Tidak ada Masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	8900 ha	8900 ha	Tidak ada Masalah		
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Kelompok	30 Kelompok	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1 Ton	1 Ton	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	55,257 Ton	55,257 Ton	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	5 Kelompok	5 Kelompok	Tidak ada Masalah		
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	15 Kelompok	15 Kelompok	Tidak ada Masalah		
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	105 Ton, 180 Unit	105 Ton, 180 Unit	Tidak ada Masalah		
25.	PARIWISATA								
		DINAS PARIWISATA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Bulan	26 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Paket, 5 Tahun	2 Paket, 5 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Tahun	3 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
				Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
26.	PERTANIAN								
		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Urusan Pemerintah Pilihan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Bulan	26 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	241 Pasang	241 Pasang	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28 Unit, 5 Keg	28 Unit, 5 Keg	Tidak ada Masalah		Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Bulan	36 Bulan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	Tidak ada Masalah		
				Pembangunan Prasarana Pertanian	8 Unit, 40 Paket, 2 Kegiatan	8 Unit, 39 Paket, 2 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENYULUH PERTANIAN					
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1 Kegiatan, 25 Bpp	1 Kegiatan, 25 Bpp	Tidak ada Masalah		
27.	PETERNAKAN								
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36 Bulan	36 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Paket, 5 Org	2 Paket, 5 Org	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket, 60 Bulan	1 Paket, 60 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit	4 Unit	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36 Bulan	36 Bulan	Tidak ada Masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18 Unit	18 Unit	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Pembangunan Prasarana Pertanian	13 Paket	13 Paket	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MAYARAKAT VETERINER					
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Tidak ada Masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
28.	PERINDUSTRIAN								
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen dan 1 Tahun anggaran	2 Dokumen dan 1 Tahun anggaran	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada Masalah		
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Paket	1 Paket	Tidak ada masalah		
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	2 kegiatan	2 kegiatan	Tidak ada masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	2 kegiatan	2 kegiatan	Tidak ada masalah		
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	4 kegiatan	4 kegiatan	Tidak ada masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	ADMINISTRASI PEMERINTAH								
29.	SEKRETARIAT DAERAH								
1.		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 unit	1 unit	Tidak ada masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD 2(Sedang)	LHE Penilaian Belum Ada	Tidak ada masalah		
2.		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optomalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	483 orang	460 orang	Tidak ada masalah		
3.		BAGIAN HUKUM		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Paket	3 Paket	Tidak ada masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Paket	3 Paket	Tidak ada masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Paket	2 Paket	Tidak ada masalah		
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada masalah		
4.		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100 persen	90 persen	Tidak ada masalah		
5.		BAGIAN PEREKONOMIAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	3 Dokumen	3 Dokumen	Tidak ada masalah		
6.		BAGIAN KERJASAMA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Fasilitasi Kerja sama Daerah	100 persen	100 persen	Tidak ada masalah		
7.		BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Proses pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) di harapkan lebih optimal dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa utamanya mempertimbangkan kemampuan keuangan penyedia dan kepemilikan sarana pendukung sehingga pekerjaan yang sudah dikontrakkan tidak mengalami kendala seperti pembatalan kontrak atau perlambatan pekerjaan.
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	90 persen	Tidak ada masalah		
8.		BAGIAN ORGANISASI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Penataan Organisasi	35 OPD	35 OPD	Tidak ada masalah		
9.		BAGIAN UMUM		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
10.		BAGIAN SUMBER DAYA ALAM		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 persen	85 persen	Tidak ada masalah		
11.		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	100 persen	Tidak ada masalah		
				Penataan Organisasi					
12.		BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pelaksanaan Protokoldan Komunikasi Pimpinan	150 kali	150 kali	Tidak ada masalah		
30.	ADMINISTRASI PEMERINTAH								
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Layanan Administrasi DPRD	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Peningkatan Kapasitas DPRD	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Fasilitasi Tugas DPRD	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
31.	PERENCANAAN								
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Tidak ada masalah		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada masalah		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Paket dan 2 kegiatan	2 Paket dan 2 kegiatan	Tidak ada masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Kegiatan	7 Kegiatan	Tidak ada masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit Kendaraan Dinas dan 6 Unit Peralatan mesin lainnya	1 Unit Kendaraan Dinas dan 6 Unit Peralatan mesin lainnya	Tidak ada masalah		Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Tidak ada masalah		
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3 Kegiatan dan 3 Dokumen	3 Kegiatan dan 3 Dokumen	Tidak ada masalah		
				Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada masalah		
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada masalah		
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen dan 5 kegiatan	1 Dokumen dan 5 kegiatan	Tidak ada masalah	Nilai-nilai atau angka-angka yang keliru atau salah penulisan dalam dokumen LKPJ sudah diperbaiki.	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Dokumen dan 5 kegiatan	1 Dokumen dan 5 kegiatan	Tidak ada masalah		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen dan 3 kegiatan	1 Dokumen dan 3 kegiatan	Tidak ada masalah		
32.	PENGAWASAN								
		INSPEKTORAT DAERAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Pembangunan kantor Inspektorat mengalami putus kontrak	Luncuran dilaksanakan Tahun 2024	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6 Dokumen	6 Dokumen	Tidak ada masalah		
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak ada masalah		
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak ada masalah		
				Pendampingan dan Asistensi	3 Dokumen	3 Dokumen	Tidak ada masalah		
33.	KEUANGAN DAERAH								
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN					Dalam pengaturan tata kelola keuangan daerah perlu memperhatikan proses belanja yang terjadwal dengan baik sesuai mekanisme sehingga tidak memunculkan beban hutang jangka pendek yang dapat mengganggu mekanisme kebijakan belanja
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana	4 Dokumen	4 Dokumen	Tidak ada masalah		
				Koordinasi dan Pengelolaan	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	3 Dokumen dan 1 Tahun Anggaran	3 Dokumen dan 1 Tahun Anggaran	Tidak ada masalah		
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
34.	PENDAPATAN DAERAH								
		BADAN PENDAPATAN DAERAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	Hanya Dokumen SAKIP yang terlaksana sedangkan Dokumen PAN-RB tidak terlaksana karena Tidak ada permintaan data	Sisa Pembayaran dijadikan SILPA	Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 bulan gaji, 1 Dokumen dan 1 Tahun anggaran	14 bulan gaji, 1 Dokumen dan 1 Tahun anggaran	Tidak ada masalah		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21 Unit roda 2, 6 peralatan mesin lainnya dan 1 paket garasi mobil	21 Unit roda 2, 6 peralatan mesin lainnya dan 1 paket garasi mobil	Tidak ada masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Unit Mobil dan 10 Unit Motor	6 Unit Mobil dan 10 Unit Motor	Tidak ada masalah		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				Pengelolaan Pendapatan Daerah	7 kegiatan	7 kegiatan	Hanya 8 Kecamatan (Lainea, Andoolo Barat, Basala, Kolono, Kolono Timur, Lalembuu, Laonti dan Ranomeeto Barat) yang mencapai 100 persen target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Tahun 2023	Meningkatkan Pengawasan terhadap pembayaran pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di tahun 2024	
35.	KEPEGAWAIAN								
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada masalah		
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Tidak ada masalah		
				Mutasi dan Promosi ASN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada masalah		
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Tidak ada masalah		
36.	PENELITIAN								
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen dan 1 Laporan	4 Dokumen dan 1 Laporan	Tidak ada masalah		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 bulan Gaji ASN, 1 Tahun Anggaran, 1 Dokumen dan 1 Laporan	14 bulan Gaji ASN, 1 Tahun Anggaran, 1 Dokumen dan 1 Laporan	Tidak ada masalah		

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32 orang untuk pengadaan pakaian dan bimtek 5 Orang	32 orang untuk pengadaan pakaian dan bimtek 5 Orang	Tidak ada masalah		Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Paket, 1 Dokumen dan 2 Laporan	4 Paket, 1 Dokumen dan 2 Laporan	Tidak ada masalah		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	3 Laporan	Tidak ada masalah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 Unit Kendaraan Dinas, 7 Unit peralatan mesin lainnya dan 5 unit bangunan lainnya	9 Unit Kendaraan Dinas, 7 Unit peralatan mesin lainnya dan 5 unit bangunan lainnya	Tidak ada masalah		
				Penataan Organisasi	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak ada masalah		
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	4 Laporan	4 Laporan	Tidak ada masalah		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	4 Dokumen	4 Dokumen	Tidak ada masalah		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	3 Dokumen dan 5 Laporan	3 Dokumen dan 5 Laporan	Tidak ada masalah		

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	OPD	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Tingkat Kecapaian Program	
				Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
1	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7	100	85
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	4	100	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1	100	100
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1	100	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3	100	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	1	100	100
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2	100	100
2	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9	100	100
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN		100	86

		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2	100	96
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	3	100	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2	100	100
3	RSUD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	7	100	99,79
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2	100	99
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2	100	100
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN PEMAKAMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9	100	100
		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	3	100	100

		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	2	100	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	100	100
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	3	100	100
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	2	100	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	5	100	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH	1	100	100

		KABUPATEN/KOTA			
		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	6	100	90
		PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	2	100	100
		PROGRAM PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	1	100	100
		PROGRAM PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	2	100	100
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	100	100
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	100	-

		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	2	100	
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	100	100
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3	100	100
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	7	100	100
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3	100	100
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8	100	100
		PROGRAM PENCEGAHAN PENGENDALIAN PEMADAMAN PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	9	100	100
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	8	100	100

		/ KOTA			
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1	100	100
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1	100	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1	100	100
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1	100	100
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1	100	100
9	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	6	100	100

		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	100	100
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2	100	100
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	100	100
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1	100	100
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1	100	100
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	8	100	100
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4	100	100
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7	100	100
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3	100	90
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1	100	100
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2	100	100
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1	100	100

12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7	100	90
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1	100	100
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4	100	80
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2	100	100
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8	100	100
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3	100	100
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2	100	100
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1	100	100
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6	100	100
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	100	100

		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1	100	100
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1	100	100
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1	100	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1	100	100
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7	100	100
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2	100	100
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2	100	100
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	3	100	100
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8	100	100
		PROGRAM PENINGKATAN	1	100	100

		KERJA SAMA DESA PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1	100	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1	100	100
17	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9	100	90
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LITAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6	100	95
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3	100	100
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7	100	100
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1	100	100
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2	100	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1	100	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN	1	100	100

		INFORMASI			
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8	100	100
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1	100	100
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1	100	100
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2	100	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1	100	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENUNGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1	100	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1	100	100
20	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8	100	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMANMODAL	2	100	100

		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1	100	100
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1	100	100
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1	100	100
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1	100	100
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4	100	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	13	100	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1	100	100
22	DINAS PERPUSTAKAAN	PERPUSTAKAAN			
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3	100	100
		KEARSIPAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1	100	100
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1	100	100
23	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8	100	100

	KERJA	DAERAH			
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1	100	100
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1	86	100
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3	100	83
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2	100	100
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1	100	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1	100	100
24	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9	100	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2	100	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2	100	100
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3	100	100
25	DINAS PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5	100	100

		KABUPATEN/KOTA			
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1	100	100
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1	100	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2	100	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2	100	100
26	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7	100	100
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3	100	
		PROGRAM PENYULUH PERTANIAN	1	100	100
27	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	8	100	100
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2	100	100

		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1	100	100
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MAYARAKAT VETERINER	3	100	100
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1	100	100
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	8	100	100
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1	100	100
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1	100	100
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1	100	100
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1	100	100
29	SEKRETARIAT DAERAH				
1	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6	100	100

		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	100	100
2	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5	100	100
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	100	100
3	BAGIAN HUKUM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6	100	100
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	100	100
4	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6	100	100
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1	100	100
5	BAGIAN PEREKONOMIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6	100	100
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1	100	100
6	BAGIAN KERJASAMA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6	100	100

		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	100	100
7	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5	100	100
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1	100	100
8	BAGIAN ORGANISASI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7	100	100
9	BAGIAN UMUM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7	100	100
10	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6	100	100
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1	100	100
11	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10	100	100
12	BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7	100	100
30	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9	100	100

		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	5	100	100
31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8	100	100
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3	100	100
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	100	100
32	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8	100	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2	100	100
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2	100	100
33	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8	100	100
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN	5	100	100
34	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8	100	100

		KABUPATEN/KOTA			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	100	100
35	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8	100	100
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2	100	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	100	100
36	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6	100	100
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3	100	100

3.2 Kebijakan Strategis.

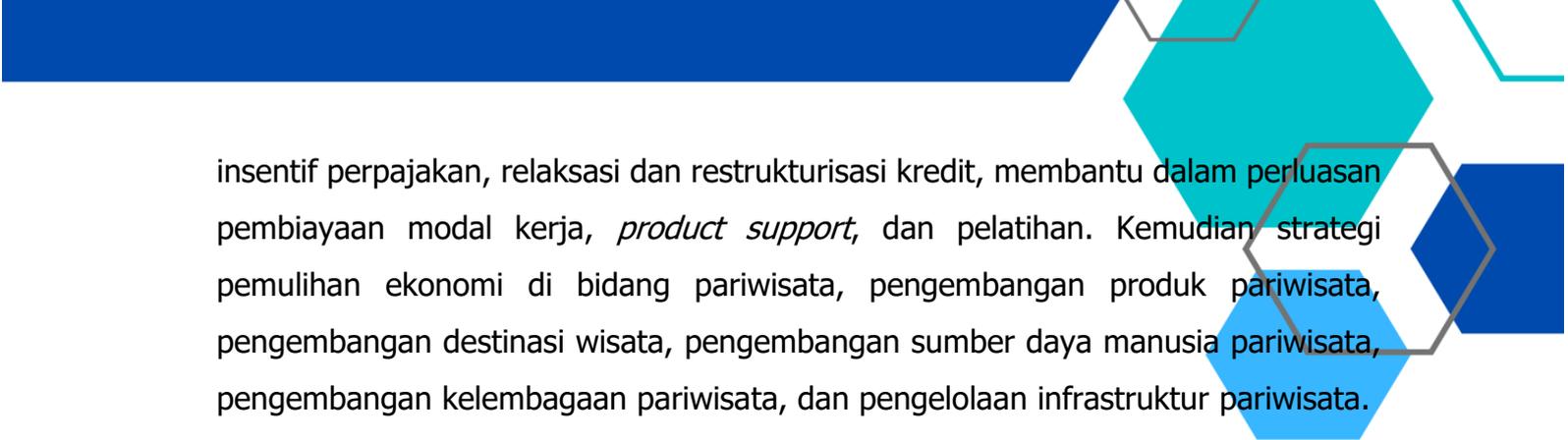
Pemerintah Indonesia pada tahun 2023 menetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2023, yakni PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6 Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, serta PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sehubungan dengan 7 Prioritas nasional tersebut Dimana pasca pandemi covid-19 tahun 2020, 2021 sampai dengan 2022 pemerintah Kabupaten Konawe Selatan di tahun 2023 mulai berfokus Menyusun program dan kegiatan yang tujuan utamanya memperbaiki dampak dan efek pandemi selama 3 tahun tersebut, Dimana kegiatan tersebut banyak diarahkan pada pemulihan ekonomi masyarakat dan peningkatan ketahanan pangan.

Pada tahun 2023 selain peningkatan ketahanan pangan pemerintah daerah juga mengalokasikan sebahagian anggaran pada kegiatan sarana prasarana infrastruktur seperti jalan, jembatan, sarana prasarana Pendidikan dan Kesehatan. Pemerintah sangat menyadari betapa pentingnya keberadaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang bisa memotong biaya distribusi pangan dan industri dari berbagai pelosok negeri. Namun juga harus dipahami bahwa dalam kondisi saat ini, sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ini tak bisa diabaikan.

Di tahun 2023 pula ada sebahagian dana daerah dipergunakan untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak, konsekwensinya ada dana daerah yang di porsikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga ada beberapa program kegiatan belum dapat dijalankan pada tahun 2023, pada tahun ini pula skala prioritas pemabngunan dan anggaran di implementasikan dengan maksimal.

Selian itu pemerintah Kabupaten Konawe Selatan juga mendorong perkembangan inovasi, relaksasi pinjaman dan digitalisasi baik di UMKM maupun pariwisata. Sementara itu, strategi pemulihan ekonomi di sektor UMKM adalah: memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, membantu Masyarakat dalam



insentif perpajakan, relaksasi dan restrukturisasi kredit, membantu dalam perluasan pembiayaan modal kerja, *product support*, dan pelatihan. Kemudian strategi pemulihan ekonomi di bidang pariwisata, pengembangan produk pariwisata, pengembangan destinasi wisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, pengembangan kelembagaan pariwisata, dan pengelolaan infrastruktur pariwisata.

Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
1.	Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA)	Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 2. Menjamin pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.
2.	Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal di kabupaten Konawe Selatan	Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Penanaman Modal di Daerah; 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; 3. Menciptakan lapangan kerja; 4. Meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah; 5. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan 6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3	Komisi Perlindungan Anak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. terlaksananya koordinasi dan keterpaduan lintas sektor secara menyeluruh, dinamis, berdaya guna dan berhasil guna antar perangkat daerah/lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perlindungan Anak; 2. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perlindungan Anak; 3. melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perlindungan Anak; 4. melakukan sosialisasi, pencegahan kekerasan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan atau kebijakan

			<p>perlindungan anak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia; dan</p> <p>5.meningkatkan pengertian dan pengawasan masyarakat terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak serta meningkatkan upaya pengawasan dan perlindungan anak secara lintas sektor menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.</p>
4.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Selatan	Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2023	Terwujudnya pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang baik dan teratur

3.3 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi LKPJ

4.3 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi LKPJ

Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada Kepala Daerah berupa catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang selanjutnya dirumuskan dalam keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD tentang LKPJ. Hasil rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Konawe Selatan pada tahun sebelumnya diberikan berupa saran dan untuk perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah kedepan, agar capaian mengacu pada target dan realisasi anggaran dan capaian kinerja dengan tetap mengacu pada RPJMD. Mengawal apa yang telah tertuang dalam RPJMD Bupati Konawe Selatan, maka DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan dengan salah satu melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Konawe Selatan Tahun sebelumnya. Atas dasar hal tersebut maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan memberikan catatan catatan strategis/rekomendasi.

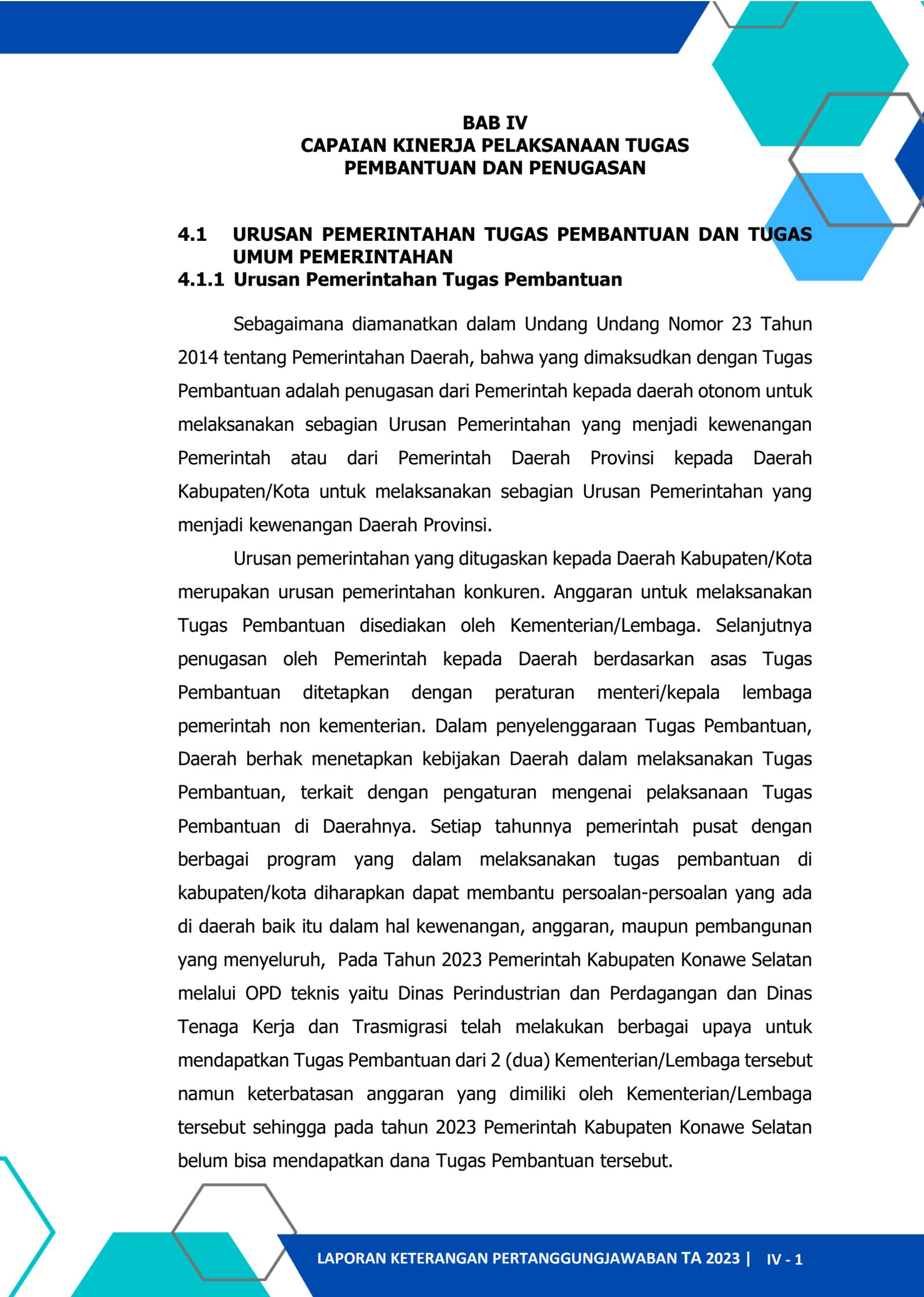
LKPJ akhir tahun anggaran 2023 mengandung makna sangat strategis dalam penyampaian progres pembangunan selama satu tahun, sehingga rekomendasi DPRD yang disampaikan berbentuk saran dan koreksi yang bersifat membangun guna perbaikan ke depan, segala masukan atau kritikan yang tertuang dalam poin-poin catatan strategis merupakan bahan yang sangat berharga. Selanjutnya akan berupaya mengkaji dengan seksama poin demi poin catatan-catatan strategis yang telah disampaikan oleh DPRD dalam rekomendasi untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi optimalisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kedepannya.

Berikut tindak lanjut hasil rekomendasi tahun sebelumnya diharapkan dengan adanya perhatian dari DPRD Kabupaten Konawe Selatan selaku mitra kerja bersama Bupati dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Konawe Selatan ke arah yang lebih baik.

NO	OPD/REKOMENDASI DPRD KAB. KONAWE SELATAN	TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Pemerintah Daerah harus tuntaskan utang-utang jangka pendek	Dalam pengaturan tata kelola keuangan daerah perlu memperhatikan proses belanja yang terjadwal dengan baik sesuai mekanisme sehingga tidak memunculkan beban hutang jangka pendek yang dapat mengganggu mekanisme kebijakan belanja	Mengalokasikan anggaran khususnya pendanaan yang bersifat utang jangka pendek pemerintah dan berupaya semua utang jangka pendek dapat dilunasi
2	Penyedia dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui unit layanan pengadaan harus jelas kemampuan keuangan dan kepemilikan sarana pendukung dan juga syarat lainnya termasuk AMP	Proses pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) di harapkan lebih optimal dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa utamanya mempertimbangkan kemampuan keuangan penyedia dan kepemilikan sarana pendukung sehingga pekerjaan yang sudah dikontrakkan tidak mengalami kendala seperti pembatalan kontrak atau perlambatan pekerjaan.	Mengoptimalkan peran Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pokja pengadaan barang/jasa khususnya dalam upgrade kemampuan dan sertifikasi sehingga proses evaluasi oleh pokja lebih baik, selain itu penyediaan sarana prasarana pendukung bagi para anggota pokja pengadaan barang/jasa.
3	DAK yang silpa harus diselesaikan dan jangan terulang menjadi silpa di DAK selanjutnya.	Perencanaan DAK tidak hanya berorientasi pada ketersediaan anggaran tetapi mempertimbangkan asas manfaat sehingga apabila ada pekerjaan yang dibiayai oleh DAK harus lebih intens dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat agar pendanaan tersedia bisa lebih efektif pengelolaannya dan bersifat adil namun apabila tidak ada DAK maka pendanaan perlu dipertimbangkan lewat DAU.	Melakukan koordinasi dengan intens ke kementerian/Lembaga terkait khususnya yang mengelola dana DAK, khususnya dalam upaya memperbesar alokasi anggaran yang bisa turun ke daerah termasuk jenis program kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah

NO	OPD/REKOMENDASI DPRD KAB. KONAWA SELATAN	TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
4	Pimpinan OPD perlu memperhatikan Urusan Wajib Koordinasi, Integrasi dan Sinergitas (KIS) dalam setiap rapat diskusi bersama.	Agar tidak terjadi perlambatan pekerjaan yang bersifat antrian maka diharapkan OPD dapat melakukan perencanaan, penjadwalan atau scheduling terhadap pekerjaan sehingga tercipta optimalisasi waktu dan tidak terjadi pemutusan hubungan kontrak.	Membuat perencanaan program kegiatan secara matang di setiap OPD untuk mencegah <i>re-scedulling</i> , dengan meningkatkan koordinasi dengan berbagai OPD khususnya program kegiatan yang saling terkait erat.
5	Perlu mempertimbangkan asas manfaat program khususnya dana BOS dan juga data base dalam system pendataan nasional (Dapodik).	Agar supaya dalam tata Kelola penyediaan barang dan jasa khususnya dana hibah atau bantuan langsung pada masyarakat agar secara paralel (secara bersamaan) mempertimbangkan pembentukan kelompok penerima manfaat dan proses pengadaan memperhatikan (<i>by Name By Adreas</i>), CPCL dan lain-lain.	Meningkatkan lagi pemanfaatan dana BOS biar lebih efektif dan efisien, memperbaiki data siswa dalam Dapodik. Dan bagi penerima manfaat program lain diadakan CPCL dan pendataan secara <i>by Name By Adress</i> .
6	Nilai-nilai atau angka-angka yang keliru dalam penulisan LKPJ segera diperbaiki.	Dalam rangka penguatan pelaksanaan kewenangan urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan secara operasional dilaksanakan oleh OPD maka diharapkan dalam setiap jenjang rapat seluruh pimpinan bersama stafnya wajib hadir dan melakukan pertemuan rapat diskusi bersama, proses pendelegasian atau diwakilkan dapat dilakukan dengan alasan atau pertimbangan bahwa pimpinan berhalangan tetap.	Dalam proses penyusunan LKPJ menggunakan format penyusunan sesuai ketentuan yang berlaku , yang selanjutnya memperbaharui dengan data terbaru dan mengoreksi apa bila terjadi kesalahan dalam penulisan.

NO	OPD/REKOMENDASI DPRD KAB. KONAWE SELATAN	TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>Nilai-nilai atau angka-angka yang keliru atau salah penulisan dalam dokumen LKPJ sudah diperbaiki.</p>	



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 URUSAN PEMERINTAHAN TUGAS PEMBANTUAN DAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

4.1.1 Urusan Pemerintahan Tugas Pembantuan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksudkan dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota merupakan urusan pemerintahan konkuren. Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh Kementerian/Lembaga. Selanjutnya penugasan oleh Pemerintah kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian. Dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya. Setiap tahunnya pemerintah pusat dengan berbagai program yang dalam melaksanakan tugas pembantuan di kabupaten/kota diharapkan dapat membantu persoalan-persoalan yang ada di daerah baik itu dalam hal kewenangan, anggaran, maupun pembangunan yang menyeluruh, Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melalui OPD teknis yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan Tugas Pembantuan dari 2 (dua) Kementerian/Lembaga tersebut namun keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga tersebut sehingga pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan belum bisa mendapatkan dana Tugas Pembantuan tersebut.

4.1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 2023

Adapun dasar- dasar hukum penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada pasal 94 yang berisikan penjelasan umum Dana Tugas Pembantuan (TP), penganggaran Dana Tugas Pembantuan (TP), penyaluran Dana Tugas Pembantuan (TP) serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58;

- 
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
 13. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (TP);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2023.

Adapun Lingkup urusan Pemerintah yang diberikan dana Tugas Pembantuan (TP) kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan adalah :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Konawe Selatan

Pada Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah membuat dan menyampaikan usulan kegiatan kepada Kementerian Perdagangan untuk Pemberian dana Tugas Pembantuan (TP) untuk Tahun 2023, namun APBN

Kementerian Perdagangan RI semakin mengalami penurunan. Dengan penurunan alokasi anggaran tersebut jumlah Kabupaten/kota penerima manfaat setiap tahunnya juga mengalami penurunan. Untuk Tahun anggaran 2023 Jumlah penerima alokasi Dana tugas Pembantuan (TP) adalah hanya 60 kabupaten/Kota dengan total anggaran berkisar 180 Milyar. Mengingat semakin terbatasnya alokasi anggaran tersebut, Kementerian Perdagangan mengambil kebijakan untuk memprioritaskan Kabupaten/Kota yang belum pernah mendapat Alokasi Dana tugas Pembantuan (TP).

Kabupaten Konawe Selatan sejak tahun 2014 hingga tahun 2022 hampir setiap tahunnya mendapat Alokasi Dana Tugas pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan, sehingga untuk tahun 2023 tidak menjadi Kabupaten/Kota prioritas penerima alokasi Dana TP.

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan

Berbagai Upaya yang telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi untuk mendapatkan dana Tugas Pembantuan (TP), adalah melalui intensitas dan Koordinasi kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia terus dilaksanakan, baik itu lintas sektor maupun Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengusulan Tugas Pembantuan, Program dan Kegiatan yang selalu di sampaikan oleh Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi tentunya selalu mengacu pada Juknis dan Readiness Criteria yang digunakan oleh Kementerian, namun dengan anggaran 200 miliar yang dimiliki oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum mampu untuk memenuhi kurang lebih 500 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, sehingga kabupaten Konawe Selatan belum menjadi lokasi prioritas untuk mendapatkan Dana Tugas Pembantuan tersebut.

BAB V PENUTUP

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. LKPJ Bupati Konawe Selatan pada akhir tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Konawe Selatan, yang mengedepankan pelayanan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

LKPJ Tahun 2023 merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023. Secara prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan secara optimal, hal ini terlihat pada implememntasi program pemerintahan di masyarakat. Oleh karena itu saran, kritik dan rekomendasi strategis dari DPRD Kabupaten Konawe Selatan sangat dibutuhkan pada penyelenggaraan kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dimasa mendatang untuk dijadikan acuan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas serta akuntabilitas melalui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

Ucapan terima kasih Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan disampaikan kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan seluruh stakeholder pemangku kepentingan lainnya atas pencapaian penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Capaian kinerja tersebut merupakan dukungan DPRD, Jaringan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, partisipasi pemerintah desa dan kecamatan serta seluruh masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Konawe Selatan dapat berjalan dengan baik. Pencapaian di tahun 2023 akan terus ditingkatkan dalam upaya pelayanan kepada masyarakat konawe selatan.

BUPATI KONAWA SELATAN

H. SURUNUDDIN DANGGA, ST, MM